

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAN PERTUMBUHAN
EKONOMI DAERAH: KASUS PADA KABUPATEN/KOTA
MADYA DI PROVINSI ACEH PERIODE 2020-2024**



Diajukan oleh:

Fauzan Ridha

23911061

**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2025

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI
DAERAH: KASUS PADA KABUPATEN/KOTA MADYA DI PROVINSI
ACEH PERIODE 2020-2024**

Tesis S-2
Program Magister Manajemen



Diajukan oleh:
Fauzan Ridha
23911061

**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2025**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fauzan Ridha
Tempat, Tanggal Lahir : Banda Aceh, 13 September 1999
NIM : 23911061
Program Studi : Magister Manajemen

Dengan ini menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis dan diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman apapun sesuai peraturan yang berlaku.

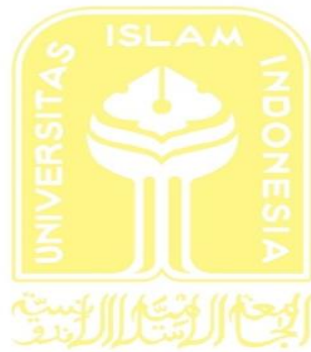
Yogyakarta. 06 Januari 2026

Penulis,



Fauzan Ridha
NIM. 23911061

HALAMAN PENGESAHAN



Yogyakarta,

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Penguji I

Prof. Dr. Drs. Sutrisno, MM.

Dosen Penguji II

Prof. Dr. Zaenal Arifin, M.Si.

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2025 Program Studi Magister Manajemen, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun oleh :

FAUZAN RIDHA

No. Mhs. : 23911061

Konsentrasi : Manajemen Keuangan Strategik & Syariah

Dengan Judul:

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH: KASUS
PADA PROVINSI ACEH TAHUN PERIODE 2020-2024**

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I



Prof. Dr. Drs. Sutrisno, MM.

Penguji II



Prof. Dr. Zaenal Arifin, M.Si.



Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Manajemen,



Anjar Priyono, SE., M.Si., Ph.D

KATA PENGANTAR.

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, segala puji hanya milik Allah SWT, dzat yang Maha Agung, Maha Sempurna, atas limpahan nikmat dan karunia yang tak henti-hentinya dianugerahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Manajemen Fakultas Bisnis & Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman. Dalam penulisan tesis ini, penulis menyadari bahwa penyusunan tesis tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua tercinta, Ibu Feri Mulyati dan Bapak Zainuddin, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan moral maupun material, serta motivasi yang tidak pernah putus sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini dengan baik.
2. Kakak dan adik tercinta, yang selalu memberikan semangat, perhatian, dan dukungan kepada penulis selama proses perkuliahan dan penyusunan laporan ini.
3. Prof. Dr. Drs. Sutrisno, M.M. selaku Dosen Pembimbing, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan, bimbingan, saran, serta motivasi kepada penulis sehingga laporan ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Anjar Priyono, S.E., M.Si., Ph.D., CPM. selaku Ketua Jurusan Magister Manajemen Fakultas Bisnis & Ekonomika Universitas Islam Indonesia, atas dukungan, kebijakan, serta fasilitas yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan.
5. Seluruh dosen Jurusan Magister Manajemen Fakultas Bisnis & Ekonomika Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengalaman berharga selama proses perkuliahan.

6. Ulli Fina Noviar, yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan ide, masukan, diskusi, serta dukungan selama proses penyusunan laporan ini.
7. Teman-teman Nur Rois, Fernanda, Ullin Nuha, Atta, Firdan, Gilang, Riski, Rafif, Aklis, Arham, Fandi, Simon, serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas kebersamaan, bantuan, dukungan, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
BERITA ACARA UJIAN TESIS	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
ABSTRACT	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Kajian Pustaka.....	9
2.1.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	9
2.1.2 Keuangan Daerah	9
2.1.3 Pengelolaan Keuangan Daerah	11
2.1.4 Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah	12
2.1.5 Teori Pertumbuhan Ekonomi	19
2.1.6 Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah	21
2.1.7 Keterkaitan Rasio Kinerja Keuangan dengan Pertumbuhan Ekonomi	21
2.2 Pengembangan Hipotesis	23
2.2.1 Peran Pertumbuhan Rasio Kemandirian Fiskal dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi	23
2.2.2 Peran Pertumbuhan Rasio Efektivitas Pendapatan Daerah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi	24
2.2.3 Peran Pertumbuhan Rasio Fiskal Daerah Daerah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi	25

2.2.4 Peran Pertumbuhan Rasio Belanja Pemerintah Daerah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi -----	26
2.3 Kerangka Konsep Penelitian -----	27
BAB III METODE PENELITIAN -----	28
3.1 Populasi & Sampel -----	28
3.2 Data dan Sumber Data -----	29
3.3 Variabel Penelitian -----	31
3.3.1 Pertumbuhan Rasio Kemandirian -----	31
3.3.2 Pertumbuhan Rasio Efektivitas -----	32
3.3.3 Pertumbuhan Rasio Fiskal -----	34
3.3.4 Pertumbuhan Rasio Belanja -----	34
3.3.5 Pertumbuhan Ekonomi -----	35
3.4 Analisis Data -----	36
3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif -----	36
3.4.2 Analisis Regresi Data Panel -----	37
3.4.3 Uji Asumsi Klasik -----	38
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN -----	40
4.1 Analisis Deskriptif Statistik -----	40
4.2 Uji Asumsi Klasik -----	42
4.3 Pemilihan Model Uji -----	46
4.3.1 Uji Chow -----	47
4.3.2 Uji Hausman -----	48
4.3.3 Uji Lagrange Multiplier -----	49
4.4. Hasil Estimasi Model Random Effect (REM) -----	50
4.5 Pembahasan Hasil Penelitian -----	54
4.5.1 Pengaruh Pertumbuhan Rasio Kemandirian Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi -----	54
4.5.2 Pengaruh Rasio Pertumbuhan Efektivitas PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi -----	56
4.5.3 Pengaruh Pertumbuhan Rasio PAD/Fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi -----	59
4.5.4 Pengaruh Pertumbuhan Belanja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi -----	61

BAB V PENUTUP-----	64
5.1 Kesimpulan-----	64
5.2 Saran-----	65
DAFTAR PUSTAKA -----	68

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kriteria Rasio Kemandirian	16
Tabel 2.2 Kriteria Rasio Efektivitas	17
Tabel 2.3 Kategori Tingkat Pertumbuhan	18
Tabel 4.1 Analisis Deskriptif Statistik	40
Tabel 4.2 Uji Multikolinearitas	43
Tabel 4.3 Uji Heteroskedastisitas	44
Tabel 4.4 Uji Autokorelasi.....	46
Tabel 4.5 Uji Chow	47
Tabel 4.6 Uji Hausman.....	48
Tabel 4.7 Uji Lagrange Multiplier.....	50
Tabel 4.8 Random Effect Model	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian	27
---	----

ABSTRACT

All information related to regional financial performance can be accessed by the public through officially published local government financial reports. This study aims to examine the effect of regional financial performance ratios on economic growth across regencies and cities in Aceh Province. Economic growth is measured by the growth rate of Gross Regional Domestic Product (GRDP), while regional financial performance is represented by the growth ratio of fiscal independence, the growth ratio of local revenue (PAD) effectiveness, the fiscal growth ratio, and the regional expenditure growth ratio. The population of this study includes all regencies and cities in Aceh Province, with a total sample of 23 local governments selected using a saturated sampling method, and an observation period of five years (2020–2024). Hypothesis testing is conducted using panel data regression analysis with a significance level of 0.05. The results show that the growth ratio of fiscal independence and the growth ratio of PAD effectiveness have positive but insignificant effects on economic growth, while the fiscal growth ratio has a negative and significant effect on economic growth. In contrast, the regional expenditure growth ratio has a positive and significant effect on economic growth. These findings indicate that regional expenditure growth plays a more dominant role in driving economic growth than revenue-based fiscal indicators.

Keywords: regional financial performance, economic growth, panel data regression, regional expenditure growth, Aceh Province

ABSTRAK

Seluruh informasi yang berkaitan dengan kinerja keuangan daerah dapat diakses oleh publik melalui laporan keuangan pemerintah daerah yang dipublikasikan secara resmi, dan penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh rasio kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Aceh, di mana pertumbuhan ekonomi diukur melalui tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan kinerja keuangan daerah direpresentasikan oleh rasio pertumbuhan kemandirian fiskal, rasio pertumbuhan efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), rasio pertumbuhan fiskal, serta rasio pertumbuhan belanja daerah; populasi penelitian mencakup seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh dengan jumlah sampel sebanyak 23 pemerintah daerah yang dipilih menggunakan metode sampling jenuh selama periode pengamatan 2020–2024, dan pengujian hipotesis dilakukan menggunakan analisis regresi data panel dengan tingkat signifikansi 0,05, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio pertumbuhan kemandirian fiskal dan rasio pertumbuhan efektivitas PAD berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, rasio pertumbuhan fiskal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan rasio pertumbuhan belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan belanja daerah memiliki peran yang lebih dominan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dibandingkan indikator fiskal berbasis penerimaan.

Kata kunci: kinerja keuangan daerah, pertumbuhan ekonomi, regresi data panel, pertumbuhan belanja daerah, Provinsi Aceh.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan pertumbuhan ekonomi mencerminkan tingkat kemajuan pembangunan suatu daerah dan kerap digunakan sebagai ukuran untuk menilai keberhasilan kebijakan pembangunan yang telah dijalankan. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi mencerminkan bertambahnya aktivitas produksi barang dan jasa, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pembangunan daerah, dinamika pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari peran pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik secara efektif dan bertanggung jawab. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menuntut penerapan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Kualitas tata kelola keuangan daerah tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan prosedur administrasi semata, melainkan juga memiliki fungsi strategis sebagai instrumen kebijakan untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi daerah. Melalui pengelolaan fiskal yang tepat, pemerintah daerah dapat menciptakan stimulus ekonomi yang berkelanjutan dan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat (Mardiasmo, 2018).

Provinsi Aceh merupakan wilayah yang relevan untuk diteliti karena memiliki struktur fiskal yang khas apabila disejajarkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Sejak tahun 2008, Aceh menerima Dana Otonomi Khusus (Otsus) dengan nilai yang relatif besar, selain berbagai bentuk mekanisme pendanaan yang bersumber dari pemerintah pusat dalam bentuk transfer fiskal, seperti skema dana transfer pusat kepada daerah, meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Secara konseptual, besarnya alokasi dana Skema transfer fiskal dari pemerintah pusat pada dasarnya ditujukan untuk memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah, meningkatkan tingkat kemandirian keuangan, mempercepat realisasi pembangunan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Namun demikian, berbagai temuan empiris menunjukkan bahwa

kinerja pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh masih relatif rendah dan cenderung berfluktuasi dari tahun ke tahun. Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), laju pertumbuhan ekonomi Aceh dalam beberapa tahun terakhir berada di bawah rata-rata nasional, meskipun dukungan pendanaan melalui Dana Otonomi Khusus terus dialokasikan secara berkelanjutan setiap tahunnya (Sodikin & Nopiana, 2021). Kondisi ini mengindikasikan adanya persoalan mendasar dalam pengelolaan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Sejalan dengan pandangan Poyoh et al. (2017) kemampuan pemerintah dalam pengelolaan kinerja keuangan daerah menjadi cerminan utama dalam menilai efektivitas pelaksanaan otonomi daerah. Kinerja keuangan yang optimal tercermin dari tingginya tingkat kemandirian fiskal, efektivitas dalam pengelolaan dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi penggunaan anggaran, serta penetapan alokasi belanja pembangunan yang proporsional. Secara teoritis, semakin baik pencapaian indikator-indikator tersebut, semakin besar pula kontribusi yang dapat diberikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Akan tetapi, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Aceh masih memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap transfer dana dari pemerintah pusat, yang tercermin dari rendahnya tingkat kemandirian fiskal daerah.

Dalam perspektif kemandirian fiskal, kapasitas pemerintah daerah untuk mendukung pembiayaan pembangunan dengan mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tanpa dominasi pembiayaan dari transfer pemerintah pusat, menjadi indikator krusial dalam menilai kemandirian keuangan daerah. Daerah yang memiliki tingkat kemandirian fiskal yang lebih tinggi cenderung mempunyai ruang kebijakan yang lebih luas dalam menetapkan arah dan prioritas pembangunan sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan masyarakat setempat. Kondisi ini berpotensi mendorong peningkatan aktivitas ekonomi dan dinamika perekonomian daerah. Sebaliknya, besarnya ketergantungan terhadap aliran dana dari pemerintah pusat berimplikasi pada ruang fiskal daerah menjadi sempit dan mengurangi fleksibilitas pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Kondisi tersebut dibuktikan oleh penelitian Hanif (2018) dan Oktrivina et al. (2020)

yang menemukan memberikan pengaruh yang bermakna terhadap laju pertumbuhan ekonomi, bahwa kemandirian fiskal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya di Jawa Timur dan Sumatera Utara.

Efektivitas realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) penilaian terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah banyak bertumpu pada indikator tersebut. Ukuran ini menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan anggaran. Tingkat efektivitas realisasi PAD yang tinggi mencerminkan keberhasilan pengelolaan fiskal serta ketepatan strategi pemungutan pendapatan yang diterapkan, sehingga dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam menopang pembiayaan pembangunan. Secara konseptual, peningkatan efektivitas realisasi PAD akan diikuti oleh meningkatnya kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam mendorong aktivitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi regional. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Penelitian Harahap (2020) dan Ratnawati & Sari (2023) yang menegaskan bahwa pengelolaan PAD yang efektif berkontribusi positif terhadap peningkatan kinerja ekonomi daerah.

Selain itu, perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari waktu ke waktu dapat digunakan untuk menggambarkan dinamika kapasitas fiskal pemerintah daerah. Pertumbuhan PAD yang terjaga secara konsisten menunjukkan adanya penguatan potensi ekonomi daerah serta kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan yang dimiliki. Peningkatan penerimaan tersebut memberikan fleksibilitas fiskal yang lebih besar bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan pengeluaran, khususnya dalam meningkatkan alokasi belanja pembangunan. Pada akhirnya, kebijakan belanja yang didukung oleh peningkatan PAD tersebut berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Susilowati et al. (2021) serta Nadia & Putra (2023) yang menyimpulkan bahwa pertumbuhan PAD yang berkelanjutan mampu memperkuat kemandirian fiskal sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, efisiensi belanja pemerintah daerah juga merupakan faktor penting dalam meningkatkan kinerja perekonomian daerah. Tingkat efisiensi

belanja mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran secara optimal, yakni melalui pengendalian pengeluaran tanpa mengurangi capaian hasil yang produktif. Efisiensi pengelolaan anggaran yang tinggi menunjukkan bahwa setiap alokasi belanja mampu memberikan manfaat pembangunan yang maksimal, termasuk peningkatan kualitas pelayanan publik serta terciptanya efek pengganda (*multiplier effect*) yang berdampak luas terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Pandjaitan et al. (2018) serta Syamsuddin et al., (2022) yang menegaskan pentingnya efisiensi belanja dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah

Dari sudut pandang kebijakan publik, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berfungsi sebagai instrumen fiskal yang memiliki peran penting dalam mengarahkan pembangunan ekonomi daerah. Putra Agniveda & Supadmi (2019) menjelaskan bahwa baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun APBD berperan strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi, mendanai kegiatan pembangunan, serta meningkatkan pendapatan, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Selain itu, Saraswati & Dharmadiaksa (2019) menegaskan bahwa pengelolaan APBD yang efektif dan tepat sasaran dapat berkontribusi dalam melindungi kelompok masyarakat berpendapatan rendah melalui pelaksanaan program pembangunan yang berorientasi pada kepentingan publik. Dengan demikian, APBD tidak semata-mata dipandang sebagai dokumen pencatatan keuangan, melainkan juga sebagai instrumen kebijakan fiskal yang memiliki keterkaitan langsung dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun demikian, hingga saat ini masih banyak daerah di Indonesia, termasuk Provinsi Aceh, yang menghadapi kendala dalam meningkatkan tingkat kemandirian fiskal. Kondisi tersebut tercermin dari tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Oktivina et al. (2020) menyatakan bahwa ketergantungan yang tinggi tersebut antara lain dipengaruhi oleh lemahnya basis ekonomi lokal serta belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Mataris & Digdowiseiso (2022) menegaskan pentingnya inovasi serta kreativitas pemerintah daerah dalam mengembangkan sumber-sumber penerimaan

baru sebagai upaya untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. menekankan perlunya inovasi dan kreativitas pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber penerimaan baru guna memperkuat kapasitas fiskal. Sementara itu, sementara Kaunang et al. (2016) menyoroti bahwa penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran memiliki peranan krusial untuk memastikan bahwa belanja publik benar-benar menghasilkan manfaat yang nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berbagai hasil penelitian empiris menunjukkan bahwa pengaruh indikator kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi tidak bersifat seragam antarwilayah. Hanif (2018) menemukan bahwa tingkat kemandirian fiskal dan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan itu, Fernanda et al. (2023) menekankan pentingnya efektivitas serta kemandirian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung kinerja perekonomian daerah. Namun demikian, Sementara itu Ratnawati & Sari (2023) mengungkapkan adanya variasi pengaruh efisiensi belanja dan tingkat ketergantungan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di berbagai provinsi di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Bahkan, Ihwandi & Khoirunurrofik (2023) mengungkapkan bahwa desentralisasi fiskal berpotensi mendorong pembangunan yang lebih inklusif, meskipun pada kondisi tertentu kemandirian fiskal justru menunjukkan hubungan yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa meskipun desentralisasi fiskal berpotensi mendorong pembangunan yang lebih inklusif, dalam kondisi tertentu tingkat kemandirian fiskal justru dapat menunjukkan hubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi.

Paparan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan kinerja keuangan daerah tidak hanya terbatas pada Provinsi Aceh, tetapi juga dialami oleh berbagai provinsi lain di Indonesia. Meskipun demikian, Aceh memiliki kekhasan berupa penerimaan Dana Otonomi Khusus yang seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai modal utama dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Apabila pengelolaan Dana Otonomi Khusus tidak dilaksanakan secara efektif, efisien, dan berorientasi pada produktivitas, maka

potensi fiskal yang besar tersebut tidak akan mampu dioptimalkan secara maksimal dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diidentifikasi adanya perbedaan yang cukup nyata antara kerangka teoritis dan kondisi empiris di lapangan. Secara konseptual, kinerja keuangan daerah yang dikelola secara optimal dan didukung oleh besarnya Dana Otonomi Khusus seharusnya mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Akan tetapi, temuan empiris menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Aceh masih relatif rendah dan tingkat kemandirian fiskal daerah belum mencapai kondisi yang optimal. Kesenjangan antara harapan teoritis dan realitas empiris tersebut menegaskan pentingnya dilakukan penelitian lanjutan untuk mengkaji Peran Rasio Kinerja Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Rasio Keuangan dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengangkat judul Pengaruh Perumbuhan Rasio Kinerja Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2020–2024.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Apakah pertumbuhan rasio kemandirian berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Aceh pada periode 2020–2024?
- 2) Apakah pertumbuhan rasio efektivitas berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Aceh pada periode 2020–2024?
- 3) Apakah pertumbuhan rasio fiskal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Aceh pada periode 2020–2024?
- 4) Apakah pertumbuhan rasio belanja berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Aceh pada periode 2020–2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah yang telah diulas, maka adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menjelaskan pengaruh pertumbuhan rasio kemandirian terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
- 2) Untuk menjelaskan pengaruh pertumbuhan rasio efektivitas terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
- 3) Untuk menjelaskan pengaruh pertumbuhan rasio fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
- 4) Untuk menjelaskan pengaruh pertumbuhan rasio belanja terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- 1) Dari sisi pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian di bidang ekonomi daerah, khususnya yang berkaitan dengan hubungan antara rasio kinerja keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi. Temuan penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual bagi penguatan literatur mengenai pengelolaan keuangan daerah dalam konteks pembangunan ekonomi regional.
- 2) Selain itu, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai rujukan akademik bagi peneliti selanjutnya yang berminat melakukan penelitian lanjutan terkait kinerja keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi, baik pada wilayah Provinsi Aceh maupun pada daerah lain yang memiliki karakteristik fiskal yang berbeda.

1.4.2 Manfaat Praktis

- 1) Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan masukan dalam upaya mengidentifikasi serta mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.

- 2) Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu Pemerintah Provinsi Aceh dalam mengevaluasi efektivitas, efisiensi, serta tingkat kemandirian keuangan daerah, sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan fiskal daerah yang lebih tepat sasaran.
- 3) Penelitian ini juga dapat berfungsi sebagai media transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah terhadap masyarakat, dengan memberikan gambaran nyata mengenai pengelolaan keuangan daerah dan kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berfungsi sebagai instrumen fiskal yang menjadi landasan dalam menjaga disiplin pengambilan keputusan terkait kebijakan pendapatan dan belanja daerah. Untuk memastikan terwujudnya disiplin anggaran, proses perencanaan anggaran baik pada sisi penerimaan maupun pengeluaran harus disusun dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, dalam penyusunan APBD, pemerintah daerah diwajibkan mengikuti mekanisme serta prosedur administratif yang telah ditetapkan (Yuliastati, 2016). Lebih lanjut, APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disahkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kemudian ditetapkan melalui peraturan daerah. Dalam konteks ini, APBD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan keuangan, tetapi juga mencerminkan amanat masyarakat yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, baik pihak eksekutif maupun legislatif memiliki tanggung jawab untuk mengelola APBD secara akuntabel guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kualitas pelayanan publik (Andi, 2019).

2.1.2 Keuangan Daerah

Menurut Tolosang *et al.* (2018) keuangan daerah mencakup seluruh hak dan kewajiban pemerintah daerah yang muncul dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keuangan daerah dapat dipahami sebagai keseluruhan sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah, baik yang berbentuk uang maupun barang, sepanjang belum menjadi milik atau berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah tingkat yang lebih tinggi, maupun pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejalan dengan itu, Hehanussa (2015) menjelaskan bahwa

pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu rangkaian aktivitas yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pertanggungjawaban, serta pengawasan terhadap seluruh sumber daya keuangan daerah.

Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Besaran alokasi belanja daerah sangat ditentukan oleh kapasitas pendapatan yang dimiliki masing-masing pemerintah daerah, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun dari transfer pemerintah pusat melalui dana perimbangan, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil. Dukungan pendanaan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat (Ferdiansyah *et al.*, 2018). Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah memiliki kewenangan utama dalam pengaturan dan pengelolaan keuangan daerah. Pelaksanaan kewenangan tersebut dapat didelegasikan sebagian atau seluruhnya kepada pejabat terkait di lingkungan pemerintah daerah, mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan keuangan daerah. Pendelegasian kewenangan ini didasarkan pada prinsip pemisahan fungsi dan tanggung jawab antara pihak yang memberikan perintah, pihak yang melakukan pengujian, serta pihak yang menerima atau mengeluarkan dana, guna menjamin akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah memiliki kewenangan utama dalam pengaturan dan pengelolaan keuangan daerah. Kewenangan tersebut dapat didelegasikan, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pejabat terkait di lingkungan pemerintah daerah. Pendelegasian ini mencakup berbagai tahapan pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan. Pengaturan kewenangan tersebut didasarkan pada prinsip pemisahan fungsi dan tanggung jawab antara pihak yang memberikan perintah, pihak yang melakukan pengujian, serta pihak yang menerima atau mengeluarkan dana, dengan tujuan menjamin terwujudnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 156 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, keuangan daerah mencakup seluruh hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan satuan uang, termasuk seluruh bentuk kekayaan daerah, baik berupa uang maupun barang, yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya, dalam perspektif Peraturan Pemerintah Tahun 2005, Seluruh hak, kewajiban, serta aset yang bernilai ekonomi dan digunakan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan merupakan bagian dari keuangan daerah.

2.1.3 Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah mencakup serangkaian aktivitas yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan terhadap seluruh sumber daya keuangan daerah. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan keuangan daerah harus berlandaskan pada prinsip tertib administrasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas, efisiensi, serta prinsip ekonomi, transparansi, dan akuntabilitas, dengan tetap memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Prinsip tertib menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tepat waktu, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, serta didukung oleh kelengkapan bukti administratif yang dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang patuh terhadap ketentuan hukum dan dilaksanakan secara efektif serta efisien akan menghasilkan laporan keuangan yang akurat, andal, dan sesuai dengan standar yang berlaku, dengan dukungan dokumentasi yang memadai. Selain itu, kualitas pengelolaan keuangan daerah juga tidak terlepas dari peran sistem pengendalian internal, karena kelemahan sistem pengendalian dapat berdampak pada mutu laporan keuangan dan memengaruhi hasil penilaian audit (Sabriani & Rahayu, 2020).

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem keuangan negara. Proses tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan siklus manajemen, yang diawali dari tahap perencanaan, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan dan

pengawasan. Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola keuangannya secara mandiri melalui penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Penyusunan APBD diawali dengan kesepakatan antara pihak eksekutif, yaitu pemerintah daerah, dan pihak legislatif, yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), mengenai kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran yang menjadi dasar perencanaan keuangan daerah. Selanjutnya, pihak eksekutif menyusun rancangan APBD berdasarkan kebijakan dan prioritas yang telah disepakati untuk kemudian disampaikan kepada legislatif guna dilakukan pembahasan dan evaluasi bersama, sebelum akhirnya ditetapkan secara resmi menjadi peraturan daerah (Simanjuntak & Ginting, 2019).

2.1.4 Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja dapat dimaknai sebagai hasil atau keluaran dari pelaksanaan suatu kegiatan maupun program yang dicapai melalui pemanfaatan anggaran, dan dapat diukur baik dari aspek kualitas maupun kuantitas. Selain itu, kinerja juga mencerminkan derajat keberhasilan organisasi dalam merealisasikan aktivitas, program, maupun kebijakan yang dirancang untuk mencapai tujuan strategis, misi, dan visi yang telah ditetapkan (Aziz, 2016). Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, diperlukan adanya evaluasi kinerja melalui pengukuran rasio keuangan yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja daerah. Salah satu pendekatan yang umum digunakan untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan adalah melalui analisis rasio terhadap Pelaksanaan kebijakan keuangan daerah mengacu pada APBD yang telah ditetapkan sebagai dasar pengelolaan pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah (Armaja *et al.*, 2017).

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 serta konsep penilaian kinerja organisasi sektor publik menjelaskan bahwa kinerja merupakan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan atau program yang telah atau sedang dilaksanakan, yang berkaitan dengan pemanfaatan anggaran dan dapat diukur melalui indikator kuantitatif maupun kualitatif. Pengukuran kinerja tersebut dibedakan ke dalam dua kategori utama, yaitu kinerja keuangan dan kinerja non-

keuangan. Penilaian kinerja keuangan umumnya dilakukan dengan membandingkan antara anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja yang dicapai melalui analisis selisih atau varians. Sementara itu, penilaian kinerja non-keuangan mencakup berbagai aspek, seperti kualitas pelayanan, tingkat kepatuhan terhadap ketentuan, kepuasan masyarakat, serta indikator non-finansial lainnya.

Anisatul *et al.* (2016) menyatakan bahwa kinerja keuangan daerah memiliki peran penting dalam pengelolaan aset daerah yang termasuk dalam cakupan keuangan daerah. Oleh karena itu, setiap pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengatur dan mengelola sumber daya keuangan yang dimilikinya secara optimal. Dalam upaya mewujudkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Corporate Governance), tanggung jawab tersebut melekat pada pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan. Kinerja pemerintah daerah dapat dikatakan baik apabila pemerintah mampu melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan secara efektif, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Dalam konteks pemerintahan daerah, kinerja keuangan menggambarkan tingkat pencapaian yang diraih dalam pengelolaan keuangan daerah, yang mencakup aspek penerimaan dan belanja daerah, serta dilaksanakan dalam kerangka sistem keuangan daerah sesuai dengan kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam satu periode anggaran. Secara operasional, pengukuran kinerja keuangan dilakukan melalui analisis rasio keuangan yang bersumber dari laporan pertanggungjawaban keuangan daerah, seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Priyati *et al.*, 2017).

Kinerja keuangan pemerintah daerah mencerminkan capaian hasil dari pelaksanaan kegiatan atau program yang telah maupun sedang dilaksanakan dalam kaitannya dengan pemanfaatan anggaran daerah. Penilaian terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dapat dilakukan dengan mengukur tingkat efisiensi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat (Sumarjo, 2010) dalam Wahyuddin & Sugianal (2017)). Organisasi sektor publik, termasuk pemerintah, memiliki komitmen untuk menyelenggarakan pelayanan publik

dengan standar kualitas yang tinggi di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi, serta sektor pelayanan lainnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai representasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks tersebut, pemerintah daerah memerlukan suatu sistem evaluasi kinerja yang berfungsi untuk membantu manajemen sektor publik dalam menilai pencapaian strategi melalui indikator keuangan dan non-keuangan. Selain sebagai alat penilaian, sistem evaluasi kinerja juga berperan sebagai mekanisme pengendalian organisasi. Kinerja pemerintah daerah dapat dikatakan optimal apabila penyelenggaraan administrasi dan pelayanan publik dilaksanakan secara ekonomis, efektif, dan efisien (Adhiantoko, 2013) dalam Wahyuddin & Sugianal (2017)).

Pengukuran kinerja keuangan daerah pada dasarnya bertujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas dan efektivitas pemerintah daerah dalam mengelola anggaran guna mendukung penyelenggaraan pelayanan publik. Evaluasi akuntabilitas tersebut tidak hanya menitikberatkan pada kemampuan pemerintah daerah dalam menyerap dan menggunakan anggaran, tetapi juga pada kesesuaian antara alokasi anggaran dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya, serta penerapan prinsip efektivitas, efisiensi, dan keterjangkauan dalam pengelolaan anggaran (Susanto, 2019). Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, serta didukung oleh berbagai kajian dalam literatur keuangan publik, kinerja keuangan daerah dapat dianalisis melalui beberapa jenis rasio keuangan daerah. Rasio-rasio tersebut meliputi rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efektivitas keuangan daerah, rasio efisiensi keuangan daerah, serta rasio pertumbuhan keuangan daerah. Penilaian terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, khususnya pada sisi pendapatan, umumnya dilakukan dengan membandingkan antara realisasi pendapatan dan target anggaran yang telah ditetapkan. Apabila realisasi pendapatan mampu melampaui target, kondisi tersebut

dapat diindikasikan sebagai kinerja yang baik. Namun demikian, evaluasi kinerja pendapatan daerah tidak cukup hanya melihat pencapaian target secara agregat, melainkan juga perlu memperhatikan kontribusi masing-masing komponen pendapatan terhadap keseluruhan kinerja keuangan daerah.

Karlina & Nur Hamdayani (2017) menjelaskan bahwa penelitian yang mereka lakukan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh melalui metode dokumentasi. Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah secara umum masih belum optimal, terutama apabila ditinjau dari aspek varians pendapatan. Kondisi ini tercermin dari sejumlah indikator, antara lain rata-rata varians pendapatan daerah yang berada di bawah 100 persen, rasio derajat desentralisasi yang mencapai sekitar 53,54 persen, rasio kemandirian keuangan daerah dengan nilai rata-rata sebesar 176,05 persen, serta rasio pertumbuhan pendapatan daerah yang menunjukkan kecenderungan peningkatan positif. Selanjutnya, penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya dalam pengelolaan anggaran belanja daerah secara umum dapat dikategorikan dalam kondisi yang baik. Hal ini ditunjukkan oleh rata-rata varians belanja daerah yang berada di bawah 100 persen, keseimbangan alokasi belanja antara belanja modal dan belanja operasional, dengan persentase belanja modal rata-rata sekitar 24,98 persen dan belanja operasional sekitar 74,98 persen. Selain itu, tingkat efisiensi belanja daerah tercatat relatif baik, dengan nilai rata-rata sekitar 82,54 persen, serta pertumbuhan belanja daerah yang mencapai rata-rata sekitar 11,00 persen. Struktur belanja daerah juga memperlihatkan bahwa anggaran masih didominasi oleh belanja operasional dengan rata-rata sekitar 90,33 persen, sementara belanja modal hanya sekitar 9,57 persen, namun tetap disertai dengan tingkat efisiensi belanja yang relatif memadai.

Dalam laporan keuangan, rasio merujuk pada suatu nilai numerik yang mengindikasikan korelasi antara satu unsur dengan unsur lainnya. Dalam konteks laporan keuangan, rasio merupakan ukuran numerik yang menunjukkan hubungan atau perbandingan antara satu komponen dengan komponen lainnya. Menurut

Lasupu *et al.* (2021) menjelaskan bahwa rasio mencerminkan proporsi antara suatu besaran tertentu dengan besaran lain yang dianalisis melalui teknik perhitungan rasio. Penggunaan rasio keuangan tersebut dapat memberikan gambaran mengenai kualitas dan kondisi keuangan suatu entitas. Dengan demikian, evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, salah satunya menggunakan analisis rasio keuangan, yang meliputi:

1) Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian menggambarkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta penyediaan pelayanan publik secara mandiri melalui sumber-sumber pendapatan daerah, terutama yang berasal dari pajak dan retribusi daerah yang dipungut dari masyarakat. Rasio ini mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu memenuhi kebutuhan pendanaannya tanpa ketergantungan yang berlebihan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Adapun perhitungan tingkat kemandirian keuangan daerah dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{PAD}{Transfer\ Pusat + Provinsi + Pinjaman} \times 100\%$$

Kriteria rasio tingkat ketergantungan keuangan daerah berdasarkan Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996 tentang pedoman penilaian kinerja keuangan dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Kriteria Rasio Kemandirian

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Sangat rendah	0%-25%	Instruktif
Rendah	25%-50%	Konsultatif
Sedang	50%-75%	Partisipatif
Tinggi	75%-100%	Delegatif

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327, 1996

Setelah nilai rasio kemandirian diperoleh untuk setiap kabupaten/kota dan setiap tahun, penelitian ini selanjutnya menghitung pertumbuhan kemandirian dengan melihat perubahan nilai rasio tersebut dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan kemandirian dihitung menggunakan rumus pertumbuhan sebagai berikut:

$$\frac{KMit - KMit - 1}{KMit - 1} \times 100\%$$

Penggunaan rumus ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar peningkatan atau penurunan tingkat kemandirian fiskal dari satu periode ke periode berikutnya. Apabila nilai pertumbuhan bernilai positif, maka terjadi peningkatan kemandirian fiskal daerah dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya, nilai negatif menunjukkan penurunan kemandirian fiskal. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan rumus rasio kemandirian untuk mendapatkan nilai kemandirian fiskal tahunan, dan kemudian menerapkan rumus pertumbuhan untuk mengukur dinamika perubahan kemandirian fiskal dari tahun ke tahun.

2) Rasio Efektivitas

Rasio ini digunakan untuk menilai tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Melalui rasio efektivitas, dapat diketahui sejauh mana capaian realisasi PAD dibandingkan dengan target pendapatan, sehingga rasio ini mencerminkan kinerja pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penghimpunan pendapatan.

Adapun rumus perhitungannya adalah:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

Kriteria rasio tingkat efektivitas keuangan daerah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327, 1996 tentang pedoman penilaian kinerja keuangan dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Kriteria Rasio Efektivitas

Kemampuan Keuangan	Efektivitas
Sangat Tidak Efektif	< 60%
Tidak Efektif	60% – 79%
Cukup Efektif	80% – 89%
Efektif	90% – 100%
Sangat Efektif	> 100%

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327, 1996

Setelah diperoleh nilai rasio efektivitas untuk masing-masing kabupaten/kota dan setiap tahun, penelitian ini kemudian menghitung pertumbuhan efektivitas PAD dari satu periode ke periode berikutnya. Pertumbuhan ini dihitung

menggunakan rumus:

$$Rasio\ Efektivitas = \frac{EFit - EFit - 1}{EFit - 1} \times 100\%$$

Rumus tersebut digunakan untuk melihat dinamika perubahan efektivitas PAD setiap tahun. Nilai pertumbuhan yang positif menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam memenuhi target PAD meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, sementara nilai negatif mengindikasikan penurunan efektivitas.

Dengan demikian, penelitian ini menggunakan dua tahap perhitungan, yaitu:

1. Menghitung rasio efektivitas PAD menggunakan rumus Kepmendagri.
2. Menghitung pertumbuhan efektivitas menggunakan formula pertumbuhan dari nilai efektivitas tahun ke tahun.

3) Rasio Pertumbuhan Fiskal

Rasio pertumbuhan digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu meningkatkan penerimaan secara berkelanjutan dari satu periode ke periode berikutnya. Rasio ini menggambarkan sejauh mana pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau komponen penerimaan lainnya dibandingkan periode sebelumnya. Dengan kata lain, rasio ini menjadi indikator tren peningkatan atau penurunan kinerja keuangan daerah. Adapun rasio perhitungan tingkat pertumbuhan keuangan daerah sebagai berikut:

$$\frac{Realisasi\ PAD\ tahun\ n - Realisasi\ PAD\ tahun\ (n - 1)}{Realisasi\ PAD\ tahun\ (n - 1)} \times 100\%$$

Kriteria rasio tingkat pertumbuhan keuangan daerah berdasarkan Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996 tentang pedoman penilaian kinerja keuangan dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Kategori Tingkat Pertumbuhan

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)
Pertumbuhan Negatif	< 0%
Pertumbuhan Rendah	0% – 10%
Pertumbuhan Sedang	10% – 20%
Pertumbuhan Tinggi	> 20%

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327, 1996

4) Rasio Pertumbuhan Belanja Daerah

Prestasi finansial pemerintah daerah dalam mengumpulkan pendapatan dianggap efisien jika rasio yang dihasilkan kurang dari 1 (satu) atau kurang dari 100%. Semakin rendah nilai rasio efisiensi finansial daerah, maka kinerja finansial pemerintah daerah dianggap semakin unggul. Adapun rasio perhitungan tingkat efisiensi belanja daerah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Bit} - \text{Bit} - 1}{\text{Bit} - 1} \times 100\%$$

Rasio ini digunakan untuk melihat apakah belanja daerah berkembang secara positif (meningkat), stagnan, atau justru menurun. Pertumbuhan belanja yang positif menunjukkan adanya ekspansi fiskal pemerintah, sementara nilai negatif mengindikasikan penurunan aktivitas belanja pemerintah.

2.1.5 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan ekonomi memberikan kerangka konseptual dalam menjelaskan faktor-faktor yang berperan dalam meningkatkan output perekonomian serta kesejahteraan masyarakat. Dalam pandangan teori klasik, sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith (1776), pertumbuhan ekonomi didorong oleh spesialisasi produksi, pembagian kerja, dan akumulasi modal yang mampu meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, David Ricardo memperkenalkan konsep keunggulan komparatif yang menjelaskan bahwa perdagangan antarwilayah dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya secara lebih efisien.

Perkembangan teori pertumbuhan selanjutnya ditandai dengan munculnya model Harrod–Domar pada awal abad ke-20 yang menekankan peran tabungan dan investasi sebagai determinan utama pertumbuhan ekonomi. Model ini menyatakan bahwa semakin besar tingkat tabungan serta semakin efisien penggunaan modal, yang tercermin dalam nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR), maka laju pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah akan semakin tinggi (Todaro & Smith, 2015). Meskipun demikian, model Harrod–Domar memiliki keterbatasan karena cenderung menciptakan kondisi ketidakstabilan atau *knife-edge*, yaitu

situasi di mana pertumbuhan ekonomi sangat sensitif terhadap ketidakseimbangan antara investasi dan pertumbuhan output.

Model Solow-Swan (1956) memberikan sumbangan penting dalam literatur ekonomi dengan menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang tidak semata-mata ditentukan oleh akumulasi modal dan tenaga kerja, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Dalam model ini, teknologi diperlakukan sebagai faktor eksogen yang berperan dalam meningkatkan produktivitas faktor produksi sehingga mendorong peningkatan output per kapita. Dalam konteks pembangunan daerah, konsep kemajuan teknologi tersebut dapat dianalogikan dengan penerapan inovasi kebijakan fiskal serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah, yang berpotensi meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kinerja ekonomi daerah secara keseluruhan.

Teori pertumbuhan endogen yang diperkenalkan oleh Romer (1986) dan Lucas (1988) menawarkan sudut pandang baru dengan menegaskan bahwa proses pertumbuhan ekonomi dapat bersumber dari faktor-faktor internal, seperti akumulasi pengetahuan, pengembangan modal manusia, serta keterlibatan pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik yang mendukung aktivitas ekonomi. Dalam konteks pembangunan daerah, belanja pemerintah yang diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dapat dipandang sebagai bentuk investasi pada modal manusia dan modal fisik yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Barro, 1991).

Dengan demikian, teori-teori pertumbuhan tersebut memberikan dasar pemahaman bahwa pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan tepat sasaran dapat menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi di tingkat regional. Oleh karena itu, berbagai teori pertumbuhan ekonomi tersebut memberikan landasan konseptual bahwa pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara efektif, efisien, dan berorientasi pada sasaran pembangunan memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu faktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat regional.

2.1.6 Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Konsep desentralisasi fiskal menekankan pentingnya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya fiskalnya. Musgrave (1959) membagi fungsi keuangan publik ke dalam tiga fungsi utama: alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi diyakini lebih baik dilaksanakan di tingkat daerah, karena pemerintah lokal lebih memahami kebutuhan masyarakatnya. Oates (1972) kemudian memperkuat argumen ini melalui “The Decentralization Theorem”, yang menyatakan bahwa desentralisasi mampu meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya dan kesejahteraan sosial karena kebijakan lebih sesuai dengan preferensi lokal.

Dalam konteks Indonesia, penerapan otonomi daerah sejak tahun 2001 menjadi momentum penting dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Menurut Bahl & Linn (1992), desentralisasi yang efektif dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengelolaan transfer pusat yang lebih produktif. Empirinya, desentralisasi fiskal terbukti mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah jika diikuti dengan peningkatan kapasitas fiskal dan kualitas belanja publik (Rodríguez-Pose & Ezcurra, 2011)

Namun, berbagai penelitian juga menunjukkan adanya kelemahan. Ketergantungan fiskal yang tinggi pada transfer pusat justru menurunkan insentif daerah untuk menggali potensi PAD. Hal ini ditemukan oleh Ihwandi & Khoirunurrofik (2023), yang menegaskan bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia masih menghadapi tantangan berupa rendahnya kemandirian fiskal di sebagian besar provinsi. Dengan demikian, desentralisasi fiskal hanya akan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah apabila pemerintah daerah mampu meningkatkan kemandirian fiskal, efektivitas pemungutan PAD, serta mengelola transfer pusat secara efisien untuk sektor produktif.

2.1.7 Keterkaitan Rasio Kinerja Keuangan dengan Pertumbuhan Ekonomi

Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah dapat dinilai melalui berbagai indikator rasio kinerja keuangan yang mencerminkan kemampuan fiskal pemerintah daerah. Salah satu indikator yang sering digunakan adalah rasio

kemandirian fiskal, yang menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu membiayai kegiatan pembangunan dengan mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa ketergantungan yang berlebihan terhadap pemerintah pusat. Panggabean & Siregar (2021) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat kemandirian fiskal suatu daerah, semakin kuat pula basis ekonomi lokal yang dimiliki, sehingga daerah tersebut memiliki kapasitas yang lebih besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan pembangunan yang bersumber dari kemampuan fiskalnya sendiri.

Indikator berikutnya adalah rasio efektivitas PAD, yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam merealisasikan target pendapatan yang telah ditetapkan. Harahap (2020) menemukan bahwa efektivitas pengelolaan PAD menunjukkan hubungan yang searah dan bermakna secara statistik terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur, karena peningkatan efektivitas PAD akan memperluas ruang fiskal bagi pemerintah daerah untuk membiayai belanja pembangunan. Sejalan dengan temuan tersebut menemukan bahwa efektivitas pengelolaan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Peningkatan efektivitas PAD memperluas ruang fiskal pemerintah daerah, sehingga memungkinkan peningkatan alokasi belanja pembangunan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan temuan tersebut, Ratnawati & Sari (2023) menegaskan bahwa efektivitas PAD terbukti memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di berbagai provinsi, meskipun besarnya pengaruh yang ditimbulkan menunjukkan perbedaan antarwilayah.

Indikator berikutnya adalah rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mencerminkan perkembangan penerimaan PAD dari waktu ke waktu. Rasio ini memberikan gambaran mengenai kemampuan daerah dalam meningkatkan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari potensi ekonomi lokal. Susilowati et al. (2021), menyatakan bahwa tingginya pertumbuhan PAD memungkinkan pemerintah daerah memperkuat kapasitas fiskalnya sehingga mampu mendanai berbagai program pembangunan secara lebih luas. Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Nadia & Putra (2023) yang menunjukkan

bahwa pertumbuhan PAD yang berkelanjutan berpengaruh positif terhadap peningkatan kemandirian fiskal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Indikator selanjutnya adalah rasio efisiensi belanja daerah, yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan anggaran secara hemat namun tetap menghasilkan output yang produktif. Pandjaitan et al. (2018) menemukan bahwa tingkat efisiensi belanja daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, karena pengelolaan anggaran yang efisien memungkinkan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan biaya yang relatif lebih rendah. Hasil penelitian tersebut diperkuat oleh Syamsuddin et al. (2022) bahwa pengelolaan belanja daerah yang efisien memperkuat kualitas pembangunan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi regional.

Sebaliknya, rasio ketergantungan cenderung berpengaruh negatif. Daerah dengan tingkat ketergantungan tinggi pada transfer pusat dinilai kurang mampu memaksimalkan potensi PAD dan kurang fleksibel dalam mengelola pembangunan (Mahmudi, 2019). Ihwandi & Khoirunurrofik (2023) bahkan menyebutkan bahwa ketergantungan fiskal menjadi salah satu penyebab stagnasi pertumbuhan ekonomi di beberapa daerah di Indonesia. Dengan demikian, secara teoritis dan empiris dapat disimpulkan bahwa rasio kinerja keuangan daerah khususnya kemandirian, efektivitas, pertumbuhan, dan efisiensi berperan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, rasio ketergantungan justru berpotensi menurunkan kemandirian fiskal dan menghambat laju pertumbuhan ekonomi daerah.

2.2 Pengembangan Hipotesis

2.2.1 Peran Pertumbuhan Rasio Kemandirian Fiskal dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Rasio kemandirian fiskal merepresentasikan kapasitas pemerintah daerah dalam membiayai aktivitas pemerintahan dan pembangunan dengan mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tingkat kemandirian yang lebih tinggi menunjukkan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya keuangan secara mandiri tanpa ketergantungan yang berlebihan pada dana transfer dari pemerintah

pusat maupun provinsi. Kemandirian fiskal yang kuat mencerminkan kapasitas daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokal dan mendukung pembiayaan pembangunan secara berkelanjutan, sehingga berpeluang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Temuan empiris mendukung pandangan tersebut. Purwanti & Noviyanti (2022) menunjukkan bahwa rendahnya kemandirian fiskal di Kota Salatiga—yang tercermin dari rasio rata-rata sebesar 27,64 persen—mengindikasikan masih tingginya ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat, sehingga kemampuan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan belum optimal. Sebaliknya, daerah dengan tingkat kemandirian fiskal yang lebih tinggi cenderung memiliki kapasitas fiskal yang lebih kuat dan peluang yang lebih besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan karena tidak terlalu bergantung pada transfer pusat.

H1: Pertumbuhan Rasio Kemandirian memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Aceh selama periode 2020–2024.

2.2.2 Peran Pertumbuhan Rasio Efektivitas Pendapatan Daerah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Rasio efektivitas PAD digunakan untuk menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam merealisasikan target pendapatan yang telah direncanakan. Tingkat efektivitas yang tinggi menunjukkan bahwa perencanaan pendapatan disusun secara realistis dan didukung oleh strategi pemungutan yang efektif, sehingga kinerja penghimpunan dan pengelolaan PAD menjadi lebih optimal. Kondisi ini berimplikasi pada meningkatnya kapasitas fiskal daerah untuk membiayai pembangunan ekonomi.

Dalam kerangka otonomi daerah, efektivitas PAD menjadi indikator penting keberhasilan pemerintah daerah dalam memperkuat kemandirian fiskal. Efektivitas yang tinggi mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan yang ditetapkan, sehingga membuka ruang fiskal yang lebih luas bagi pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan (Budiman, 2018). Hasil Penelitian

Harahap (2020) menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, karena memungkinkan pemerintah daerah membiayai pengeluaran pembangunan secara lebih mandiri tanpa ketergantungan pada transfer pusat. Yunus et al. (2022) juga menegaskan bahwa efektivitas PAD merupakan faktor kunci keberhasilan desentralisasi fiskal. Selain itu, Mataris dan Digdowiseiso (2022) menekankan bahwa efektivitas pengelolaan PAD tidak hanya meningkatkan penerimaan, tetapi juga mengoptimalkan penggunaan anggaran pada sektor-sektor produktif yang berkontribusi pada percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, Mataris & Digdowiseiso (2022) menggarisbawahi bahwa efektivitas pengelolaan PAD tidak hanya berdampak pada peningkatan penerimaan, tetapi juga pada optimalisasi penggunaan anggaran untuk sektor-sektor produktif, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.

H2: Pertumbuhan rasio efektivitas pendapatan daerah berkontribusi positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Aceh selama periode 2020–2024.

2.2.3 Peran Pertumbuhan Rasio Fiskal Daerah Daerah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Rasio pertumbuhan merupakan salah satu indikator penting untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan dari tahun ke tahun, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi rasio pertumbuhan PAD, semakin menunjukkan adanya tren peningkatan pendapatan daerah yang berkelanjutan. Pertumbuhan PAD yang positif menjadi indikasi bahwa pemerintah daerah mampu memperluas basis pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan, serta mengoptimalkan potensi sumber daya daerah. Dengan demikian, rasio pertumbuhan dapat dijadikan sebagai ukuran penting keberhasilan fiskal yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut Shafwah et al. (2024), pertumbuhan PAD yang konsisten setiap tahun mencerminkan stabilitas fiskal daerah serta meningkatkan kapasitas fiskal dalam membiayai belanja pembangunan. Stabilitas fiskal ini memperbesar peluang

daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Hal serupa disampaikan oleh Nadia & Putra (2023) yang menemukan bahwa pertumbuhan pendapatan daerah yang positif berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, karena menunjukkan adanya perbaikan kemandirian fiskal sekaligus pengurangan ketergantungan pada transfer pemerintah pusat.

Selain itu, penelitian Susilowati et al. (2021) menegaskan bahwa daerah dengan rasio pertumbuhan PAD yang tinggi cenderung memiliki kemampuan lebih baik dalam melaksanakan program pembangunan. Peningkatan penerimaan daerah memungkinkan pemerintah lebih fleksibel dan responsif dalam mengelola anggaran, sehingga dapat mengakselerasi aktivitas ekonomi lokal. Artinya, semakin besar pertumbuhan PAD, semakin kuat pula peran pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

H3: Pertumbuhan rasio fiskal memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Aceh selama periode 2020–2024.

2.2.4 Peran Pertumbuhan Rasio Belanja Pemerintah Daerah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Rasio Belanja (PRB) menggambarkan peningkatan proporsional belanja daerah dari tahun sebelumnya. Rasio ini menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah memperluas kebijakan fiskalnya melalui peningkatan kapasitas anggaran untuk pembangunan dan pelayanan publik. Secara teoritis, peningkatan rasio belanja yang konsisten mencerminkan adanya ekspansi fiskal yang bertujuan memperkuat struktur ekonomi daerah. Karena itu, pertumbuhan rasio belanja secara umum diperkirakan memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

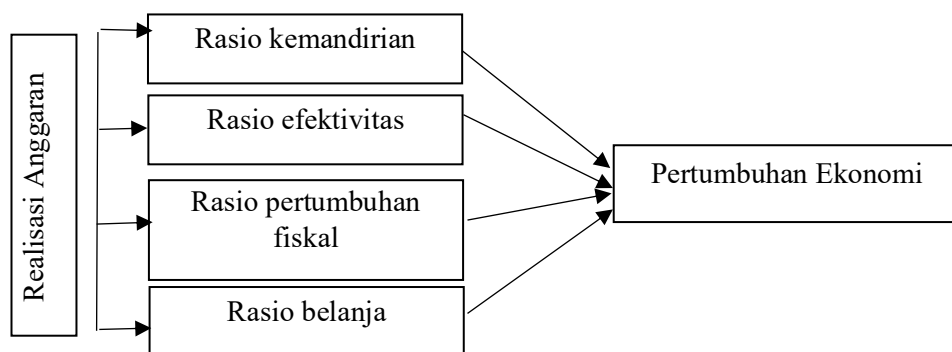
Dalam kerangka ekonomi publik, belanja pemerintah memiliki peran sentral sebagai salah satu komponen permintaan agregat yang mampu mendorong pertumbuhan output. Ketika belanja pemerintah meningkat secara proporsional dari tahun sebelumnya, terutama pada pos belanja modal, maka terjadi peningkatan investasi pemerintah yang dapat memperbaiki infrastruktur, memperluas akses

layanan dasar, dan meningkatkan produktivitas masyarakat. Proses ini menghasilkan multiplier effect, di mana setiap peningkatan belanja pemerintah menciptakan rangkaian aktivitas ekonomi tambahan di sektor lain.

Secara empiris, berbagai penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Fitri & Putri (2021) menemukan bahwa peningkatan rasio belanja memberikan dorongan signifikan terhadap aktivitas ekonomi melalui peningkatan kualitas infrastruktur dan kapasitas produksi daerah. Widiastuti (2019) juga membuktikan bahwa pertumbuhan belanja daerah, terutama belanja yang bersifat produktif, berkontribusi langsung terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Pandjaitan et al. (2018) menekankan bahwa daerah yang menunjukkan pertumbuhan belanja lebih tinggi cenderung mengalami peningkatan pembangunan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan daerah yang menahan ekspansi belanjanya.

H4: Pertumbuhan rasio belanja pemerintah daerah memberikan dampak positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Aceh selama periode 2020–2024.

2.3 Kerangka Konsep Penelitian



Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi & Sampel

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh rasio kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Aceh selama periode 2020–2024. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Aceh yang berjumlah 23 satuan pemerintahan, terdiri atas 18 kabupaten dan 5 kota. Setiap kabupaten/kota diperlakukan sebagai unit analisis karena memiliki karakteristik fiskal yang berbeda, baik dari sisi kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD), struktur belanja daerah, maupun tingkat ketergantungan terhadap dana transfer yang bersumber dari pemerintah pusat.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), laporan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta laporan realisasi belanja daerah. Data keuangan tersebut dianalisis bersama dengan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang digunakan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi daerah. PDRB dipilih karena mampu menggambarkan tingkat output dan pendapatan suatu wilayah secara agregat, sehingga sering digunakan sebagai indikator utama dalam analisis makroekonomi daerah (BPS, 2023). Dengan memanfaatkan data tersebut, Studi ini mengkaji hubungan antara performa fiskal pemerintah daerah dan perkembangan pertumbuhan ekonomi regional pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah dijadikan objek penelitian dengan pendekatan sensus agar hasil analisis merepresentasikan kondisi daerah secara komprehensif. Sugiyono (2019) sampling jenuh merupakan teknik pengambilan sampel yang melibatkan seluruh anggota populasi sebagai sampel penelitian. Metode ini dipilih karena jumlah populasi relatif terbatas, sehingga memungkinkan untuk dianalisis secara menyeluruh. Oleh karena itu, sampel penelitian ini mencakup seluruh 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh selama periode pengamatan 2020–2024, sehingga menghasilkan total 115 unit observasi yang

diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah kabupaten/kota dan jumlah tahun penelitian (23×5).

Penerapan teknik sampling jenuh dalam penelitian ini bertujuan untuk mengurangi potensi bias dalam pemilihan sampel sekaligus memastikan bahwa hasil analisis merepresentasikan kondisi keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh di Provinsi Aceh. Pendekatan ini menjadi relevan mengingat karakteristik fiskal antar kabupaten/kota di Aceh memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Sebagai contoh, Kota Banda Aceh yang didominasi oleh sektor jasa dan perdagangan memiliki struktur ekonomi yang berbeda dibandingkan Kabupaten Aceh Timur yang relatif lebih bergantung pada sektor pertanian dan industri migas. Dengan melibatkan seluruh unit populasi dalam analisis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai variasi kinerja keuangan daerah serta keterkaitannya dengan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Aceh.

Pemilihan periode penelitian 2020–2024 didasarkan pada pertimbangan bahwa rentang waktu tersebut memiliki signifikansi yang tinggi dalam dinamika perekonomian daerah. Tahun 2020 merepresentasikan awal terjadinya pandemi COVID-19 yang memberikan tekanan besar terhadap kinerja fiskal daerah dan aktivitas ekonomi. Selanjutnya, periode 2021–2024 mencerminkan fase pemulihan ekonomi, di mana pemerintah daerah dituntut untuk mengelola keuangan secara lebih efektif dan efisien guna mendukung pemulihan dan stabilisasi ekonomi. Dengan demikian, penggunaan periode penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris mengenai peran kinerja keuangan daerah dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi, baik pada saat terjadi krisis maupun dalam masa pemulihan ekonomi.

3.2 Data dan Sumber Data

Pemilihan data sekunder didasarkan pada fokus penelitian yang menelaah kinerja keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi, di mana seluruh informasi yang dibutuhkan telah tersedia dan terdokumentasi dalam berbagai laporan resmi pemerintah. Suliyanto (2018) menyatakan bahwa data sekunder merupakan data

yang diperoleh dari sumber tidak langsung atau dokumen yang telah tersedia sebelumnya, sehingga pemanfaatannya dapat mempercepat pelaksanaan penelitian dan meningkatkan ketepatan analisis, selama data tersebut berasal dari sumber yang terpercaya.

Adapun data utama yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran (APBD) pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh periode 2020–2024. Data ini memuat informasi terkait pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang digunakan untuk menghitung berbagai indikator kinerja keuangan daerah, seperti rasio kemandirian fiskal, rasio efektivitas, rasio pertumbuhan, dan rasio efisiensi belanja. Sumber data diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia serta Badan Pengelola Keuangan Aceh (BPKA).
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan per kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Data PDRB digunakan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi daerah karena mencerminkan tingkat output riil yang dihasilkan oleh masing-masing wilayah. Sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh melalui publikasi tahunan dan basis data daring..
3. Dokumen pendukung lain yang relevan, seperti laporan keuangan pemerintah daerah, regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah, serta literatur akademik berupa jurnal, buku, dan artikel ilmiah. Dokumen ini digunakan untuk memperkuat analisis teoritis maupun empiris.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Menurut Akhmad (2015) dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara menelaah berbagai dokumen tertulis, laporan resmi, arsip, atau publikasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Metode ini dipilih karena:

- Data keuangan daerah bersifat formal dan telah dipublikasikan secara reguler oleh lembaga resmi negara.
- Data yang dikumpulkan relatif konsisten antar tahun sehingga dapat dibandingkan dalam analisis panel.

- Validitas data lebih terjamin karena bersumber dari instansi resmi pemerintah (BPKA, DJPK, dan BPS).

Pemanfaatan data sekunder yang bersumber dari dokumen resmi memungkinkan penelitian ini terhindar dari potensi bias subjektif yang kerap muncul pada penggunaan data primer, seperti hasil wawancara atau kuesioner. Selain itu, penggunaan data tersebut mendukung pelaksanaan analisis yang bersifat objektif, terukur, serta dapat direplikasi oleh peneliti lain.

Di samping itu, pemilihan periode pengamatan 2020–2024 dinilai mampu merepresentasikan dinamika fiskal daerah di Provinsi Aceh, khususnya dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19 hingga memasuki fase pemulihan ekonomi. Rentang waktu ini relevan dengan tujuan penelitian yang berupaya menelaah sejauh mana rasio kinerja keuangan daerah berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan.

3.3 Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua kelompok variabel, yaitu variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Variabel independen berupa rasio-rasio kinerja keuangan daerah, sedangkan variabel dependen adalah pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Penetapan variabel penelitian didasarkan pada kerangka teori keuangan publik dan desentralisasi fiskal, serta didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang menegaskan adanya hubungan antara pengelolaan keuangan daerah dan kinerja pembangunan ekonomi (Mardiasmo, 2018; Oates, 1972; Siregar & Panggabean, 2021).

3.3.1 Pertumbuhan Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan sejauh mana kemampuan suatu daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat secara mandiri dengan mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah. Rasio ini digunakan untuk menilai tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap dana transfer yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Penghitungan rasio kemandirian keuangan daerah dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{PAD}{Jumlah\ Transfer} \times 100\%$$

Rumus tersebut digunakan untuk memperoleh nilai kemandirian fiskal masing-masing kabupaten/kota pada setiap tahun pengamatan. Nilai rasio yang dihasilkan mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan berdasarkan kontribusi PAD dibandingkan dengan dana transfer yang diterima dari pemerintah pusat dan provinsi. Setelah diperoleh nilai rasio kemandirian keuangan daerah untuk setiap tahun, penelitian ini selanjutnya menganalisis perkembangan kemandirian fiskal daerah dari waktu ke waktu. Untuk melihat perubahan tingkat kemandirian tersebut, dilakukan penghitungan pertumbuhan rasio kemandirian keuangan daerah.

Perhitungan pertumbuhan rasio kemandirian dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Rasio Kemandirian} = \frac{KMit - KMit - 1}{KMit - 1} \times 100\%$$

Rumus tersebut digunakan untuk mengetahui apakah tingkat kemandirian fiskal daerah mengalami peningkatan atau penurunan. Apabila hasilnya bernilai positif, maka menunjukkan bahwa daerah semakin mandiri; kontribusi PAD meningkat lebih cepat dibandingkan transfer. Sebaliknya, apabila bernilai negatif, maka menunjukkan turunnya kemandirian fiskal daerah yang berarti ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin besar.

3.3.2 Pertumbuhan Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas keuangan daerah mengindikasikan sejauh mana pemerintah daerah mampu merealisasikan target pendapatan yang telah ditetapkan dibandingkan dengan realisasi penerimaan yang berhasil diperoleh. Rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi sumber pendapatan untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan

publik. Semakin tinggi nilai rasio efektivitas, maka semakin efektif kinerja pemerintah daerah dalam mencapai target PAD yang telah direncanakan.

Rasio ini banyak digunakan dalam penilaian kinerja keuangan daerah karena mampu menunjukkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola sumber pendapatan lokal. Rasio efektivitas yang tinggi menandakan bahwa pemerintah daerah mampu memaksimalkan penerimaan PAD secara optimal, sedangkan rasio yang rendah menunjukkan bahwa target pendapatan tidak tercapai dan mengindikasikan perlunya perbaikan strategi penggalan pendapatan daerah. Adapun rumus perhitungan rasio efektivitas keuangan daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

Rumus tersebut digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh nilai efektivitas PAD setiap tahun pada masing-masing kabupaten/kota. Nilai ini menjadi indikator dasar yang menggambarkan seberapa besar pencapaian PAD terhadap target pendapatan yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. Setelah memperoleh nilai rasio efektivitas untuk setiap tahun, penelitian ini selanjutnya menghitung pertumbuhan efektivitas, yaitu perubahan nilai efektivitas dari tahun ke tahun. Pertumbuhan efektivitas digunakan untuk melihat dinamika peningkatan atau penurunan kinerja pemerintah daerah dalam mencapai target PAD dari periode sebelumnya ke periode berikutnya. Dengan demikian, variabel ini tidak hanya menilai efektivitas pada satu tahun tertentu, tetapi juga perkembangan efisiensi kinerja pendapatan secara berkelanjutan. Rumus yang digunakan untuk menghitung pertumbuhan efektivitas adalah sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Rasio Efektivitas} = \frac{EFit - EFit - 1}{EFit - 1} \times 100\%$$

Hasil perhitungan pertumbuhan efektivitas digunakan untuk mengetahui apakah kinerja pemerintah daerah dalam mencapai target PAD mengalami peningkatan atau penurunan. Nilai pertumbuhan yang bernilai positif menunjukkan meningkatnya efektivitas pencapaian PAD, sedangkan nilai pertumbuhan yang

bernilai negatif menunjukkan menurunnya kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target pendapatan yang telah ditetapkan.

3.3.3 Pertumbuhan Rasio Fiskal

Rasio pertumbuhan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan dari tahun ke tahun. Rasio ini menggambarkan sejauh mana pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau komponen penerimaan lainnya dibandingkan periode sebelumnya. Dengan kata lain, rasio ini menjadi indikator tren peningkatan atau penurunan kinerja keuangan daerah. Adapun rasio perhitungan tingkat pertumbuhan keuangan daerah sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Rasio Fiskal} = \frac{\text{Realisasi PAD tahun } n - \text{Realisasi PAD tahun } (n - 1)}{\text{Realisasi PAD tahun } (n - 1)} \times 100\%$$

Nilai rasio pertumbuhan yang bernilai positif menunjukkan adanya peningkatan realisasi PAD dibandingkan tahun sebelumnya, yang mencerminkan kinerja keuangan daerah yang semakin baik. Sebaliknya, nilai rasio pertumbuhan yang bernilai negatif menunjukkan terjadinya penurunan realisasi PAD, sehingga mengindikasikan melemahnya kemampuan daerah dalam meningkatkan penerimaan pendapatan.

3.3.4 Pertumbuhan Rasio Belanja

Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola pengeluaran dapat dilihat tidak hanya dari efisiensi belanja, tetapi juga dari dinamika perubahan belanja dari tahun ke tahun. Rasio pertumbuhan belanja digunakan untuk menggambarkan seberapa besar peningkatan atau penurunan realisasi belanja daerah pada periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Melalui rasio ini, pemerintah daerah dapat menilai perkembangan kebutuhan fiskal, perubahan prioritas pembangunan, serta kecenderungan kebijakan belanja daerah.

Pertumbuhan belanja menjadi indikator penting dalam evaluasi keuangan daerah karena menunjukkan arah kebijakan pengeluaran pemerintah. Pertumbuhan yang tinggi dapat mengindikasikan adanya ekspansi fiskal pemerintah dalam

mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, maupun program prioritas lainnya. Sebaliknya, pertumbuhan belanja yang rendah atau negatif dapat menunjukkan adanya penghematan, efisiensi, perubahan kebijakan, atau kondisi fiskal yang sedang tertekan. Dengan demikian, rasio ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika pengeluaran daerah dari waktu ke waktu. Adapun rumus perhitungan rasio pertumbuhan belanja daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Rasio Belanja} = \frac{\text{Bit} - \text{Bit} - 1}{\text{Bit} - 1} \times 100\%$$

Rumus ini digunakan untuk mengetahui apakah realisasi belanja daerah mengalami peningkatan (pertumbuhan positif) atau penurunan (pertumbuhan negatif) dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan yang positif dapat menggambarkan peningkatan kapasitas fiskal daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, sedangkan pertumbuhan yang negatif dapat mencerminkan adanya penyesuaian anggaran, efisiensi pengeluaran, atau menurunnya kemampuan fiskal daerah.

Maka, rasio pertumbuhan belanja daerah mencerminkan bagaimana suatu wilayah mengelola dan mengalokasikan sumber daya keuangannya secara berkelanjutan dari waktu ke waktu. Analisis pertumbuhan belanja membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengeluaran yang lebih tepat, memastikan alokasi anggaran sesuai prioritas pembangunan daerah, serta menjaga stabilitas fiskal dalam jangka panjang. Dinamika ini penting untuk mencerminkan kesiapan daerah dalam menjalankan program pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan penguatan ekonomi lokal sesuai ketentuan hukum dan kebijakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.3.5 Pertumbuhan Ekonomi

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi diukur menggunakan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Aceh selama periode 2020–2024. Penggunaan PDRB

atas dasar harga konstan bertujuan untuk menghilangkan pengaruh perubahan harga (inflasi), sehingga pertumbuhan yang dihasilkan mencerminkan peningkatan output riil daerah. Penghitungan pertumbuhan ekonomi daerah dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan pertumbuhan ekonomi menunjukkan tingkat perubahan output riil suatu daerah dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi mencerminkan peningkatan kapasitas produksi dan aktivitas ekonomi daerah, yang dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan fiskal daerah. Pengelolaan fiskal yang baik tercermin dari kemampuan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), menggunakan belanja publik secara efisien, serta mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat (Mahmudi, 2019; Ihwandi & Khoirunurrofik, 2023).

3.4 Analisis Data

3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai data penelitian yang meliputi variabel-variabel rasio kinerja keuangan daerah (kemandirian, efektivitas, pertumbuhan, efisiensi belanja) dan pertumbuhan ekonomi (PDRB) di 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh periode 2020–2024. Menurut Ghazali (2013), statistik deskriptif mencakup ukuran nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), standar deviasi, serta varian. Dengan analisis deskriptif, peneliti dapat melihat kecenderungan data, variasi antar daerah, dan pola perkembangan dari waktu ke waktu. Misalnya, apakah terdapat kabupaten yang memiliki rasio kemandirian tinggi namun pertumbuhannya rendah, atau sebaliknya. Selain itu, statistik deskriptif dapat digunakan untuk membandingkan capaian keuangan antar kabupaten/kota di Aceh, sehingga dapat diketahui daerah mana yang lebih efektif dan efisien dalam mengelola keuangannya dan bagaimana dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

3.4.2 Analisis Regresi Data Panel

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel. Pemilihan metode ini didasarkan pada karakteristik data penelitian yang mengombinasikan dimensi data lintas unit (cross-section) berupa 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh dengan dimensi runtut waktu (time series) selama periode pengamatan 2020–2024. Penggunaan regresi data panel memungkinkan peneliti untuk menganalisis variasi data antarwilayah sekaligus perubahan data dari waktu ke waktu dalam satu kerangka analisis yang terpadu. Menurut Refnaldo et al. (2019), regresi data panel memiliki keunggulan dibandingkan dengan regresi time series atau cross-section secara terpisah. Keunggulan tersebut antara lain kemampuannya dalam mengakomodasi perbedaan karakteristik antarunit observasi (heterogenitas), meningkatkan jumlah data pengamatan, serta menghasilkan estimasi parameter yang lebih efisien dan akurat.

A. Bentuk Umum Model Regresi Panel

Secara umum, model regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$PE_{it} = \alpha + \beta_1 PRK_{it} + \beta_2 PRE_{it} + \beta_3 PRF_{it} + \beta_4 PRB_{it} + \mu_{it}$$

Keterangan:

PE_{it} = Merupakan laju pertumbuhan ekonomi daerah i pada tahun t , dihitung sebagai perubahan nilai PDRB dari tahun sebelumnya.

PRK_{it} = Menggambarkan perubahan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahannya dari PAD tanpa bergantung pada pemerintah pusat.

PRE_{it} = Menunjukkan perubahan efektivitas realisasi PAD terhadap target PAD dari tahun sebelumnya.

PRF_{it} = Mengukur seberapa besar pertumbuhan kapasitas fiskal suatu daerah dibanding tahun sebelumnya.

PRB_{it} = Menggambarkan tingkat perubahan belanja daerah dari tahun sebelumnya.

α = Nilai konstanta yang menunjukkan nilai PE ketika seluruh variabel independen bernilai nol.

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien regresi masing-masing variabel independen yang menggambarkan besarnya pengaruh variabel tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi.

μ_{it} = Unsur error yang mencerminkan dampak variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam perumusan model.

Pemilihan Model Estimasi Panel

Penentuan model regresi data panel yang paling tepat dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan pengujian utama. Pertama, uji Chow digunakan untuk membandingkan kesesuaian antara Common Effect Model (CEM) dan Fixed Effect Model (FEM). Kedua, uji Hausman dilakukan untuk menentukan apakah Fixed Effect Model (FEM) atau Random Effect Model (REM) yang lebih sesuai digunakan dalam estimasi. Ketiga, uji Lagrange Multiplier (LM) digunakan untuk membandingkan Common Effect Model (CEM) dengan Random Effect Model (REM). Model regresi panel yang dipilih sebagai model terbaik ditentukan berdasarkan hasil signifikansi dari ketiga pengujian tersebut.

3.4.3 Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan interpretasi terhadap hasil estimasi regresi, model terlebih dahulu diuji melalui serangkaian uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa hasil estimasi memenuhi kriteria Best Linear Unbiased Estimator (BLUE). Uji asumsi klasik yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi:

1. Uji Multikolinearitas, yang bertujuan untuk mengidentifikasi adanya korelasi tinggi antarvariabel independen. Indikator yang digunakan adalah Variance Inflation Factor (VIF), dengan batas toleransi umum apabila nilai $VIF < 10$.
2. Uji Heteroskedastisitas, yang digunakan untuk menguji apakah varians residual bersifat konstan. Pengujian dilakukan menggunakan uji Breusch–Pagan atau uji Glejser. Apabila terdeteksi adanya heteroskedastisitas, maka digunakan pendekatan robust standard error untuk memperbaiki model.
3. Uji Autokorelasi, yang bertujuan untuk mengetahui apakah residual saling berkorelasi antarperiode pengamatan. Uji yang digunakan antara lain

Durbin–Watson (DW) atau Breusch–Godfrey. Nilai DW yang mendekati angka 2 menunjukkan tidak adanya autokorelasi.

Apabila dalam pengujian ditemukan pelanggaran terhadap asumsi klasik, maka dilakukan perbaikan model melalui pendekatan Generalized Least Squares (GLS) atau metode regresi robust.

3.4.4 Interpretasi dan Pengujian Hipotesis

Tahap akhir dalam analisis penelitian ini adalah melakukan interpretasi hasil regresi serta pengujian hipotesis yang telah dirumuskan. Interpretasi hasil estimasi dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek utama, yaitu:

1. Arah hubungan, yang ditentukan berdasarkan tanda koefisien regresi (β). Koefisien bernilai positif menunjukkan bahwa peningkatan rasio kinerja keuangan daerah akan diikuti oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi, sedangkan koefisien bernilai negatif menunjukkan hubungan yang berlawanan.
2. Besar pengaruh, yang dilihat dari nilai koefisien regresi. Semakin besar nilai koefisien, semakin kuat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
3. Signifikansi statistik, yang diuji menggunakan nilai probabilitas (p -value). Apabila nilai $p < 0,05$, maka pengaruh variabel independen dinyatakan signifikan pada tingkat signifikansi 5 persen.

Hasil pengujian hipotesis selanjutnya digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian serta menarik kesimpulan mengenai pengaruh rasio kinerja keuangan daerah yang meliputi kemandirian fiskal, efektivitas PAD, pertumbuhan fiskal, dan efisiensi belanja terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Aceh selama periode 2020–2024.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Deskriptif Statistik

Analisis deskriptif statistik dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data penelitian sebelum dilakukan pengujian lebih lanjut. Statistik deskriptif ini menyajikan ukuran-ukuran penting, seperti nilai rata-rata (mean), nilai maksimum dan minimum, serta standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian yang meliputi Pertumbuhan Ekonomi (PE), Pertumbuhan Rasio Kemandirian (PRK), Pertumbuhan Rasio Efektivitas (PRE), Pertumbuhan Rasio Fiskal (PRF), dan Pertumbuhan Rasio Belanja (PRB). Hasil analisis deskriptif tersebut disajikan pada Tabel 4.1.berikut:

Tabel 4.1 Analisis Deskriptif Statistik					
	PE	PRK	PRE	PRF	PRB
Mean	6.206401	10.66350	4.113701	6.797332	-0.127256
Median	6.459602	6.983824	2.476826	3.597526	-2.219318
Maximum	26.13794	269.7164	390.8495	297.3707	25.44021
Minimum	-16.14212	-65.41445	-94.38997	-71.96216	-24.41857
Std. Dev.	5.243036	34.74397	43.69935	34.21197	9.672761
Observations	115	115	115	115	115
Kabupaten Tertinggi	Aceh Barat	Aceh Tenggara	Aceh Tenggara	Aceh Tenggara	Aceh Barat
Kabupaten Terendah	Aceh Barat Daya	Aceh Tenggara	Aceh Tenggara	Aceh Tenggara	Kota Subusalam

Sumber: Eviews 13, Data Diolah (2025)

Berdasarkan hasil analisis yang disajikan pada Tabel 4.1, variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE) memiliki nilai rata-rata sebesar 6,21 dengan standar deviasi 5,24. Temuan ini menunjukkan bahwa secara umum pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Aceh selama periode 2020–2024 cenderung berfluktuasi, meskipun masih berada di sekitar nilai rata-ratanya. Nilai maksimum sebesar 26,14 mengindikasikan adanya daerah yang mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi relatif tinggi, sedangkan nilai minimum sebesar –16,14 mencerminkan bahwa pada periode tertentu terdapat daerah yang mengalami kontraksi ekonomi.

Selanjutnya, variabel Pertumbuhan Rasio Kemandirian (PRK) menunjukkan nilai rata-rata 10,66 dengan standar deviasi 34,74, yang mengindikasikan tingkat variasi antar kabupaten/kota tergolong cukup besar. Nilai maksimum sebesar 269,72 menggambarkan adanya daerah dengan tingkat kemandirian fiskal yang sangat tinggi, sementara nilai minimum sebesar -65,41 menunjukkan masih terdapat daerah yang memiliki ketergantungan fiskal yang kuat terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Variabel Pertumbuhan Rasio Efektivitas (PRE) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 4.11 dengan standar deviasi 43.70, mengindikasikan tingkat variasi efektivitas antar daerah sangat besar. Nilai maksimum sebesar 390.84 dan minimum -94.38 menggambarkan bahwa kinerja efektivitas pengelolaan PAD di beberapa daerah jauh lebih tinggi dibandingkan daerah lain.

Sementara itu, variabel Pertumbuhan Rasio Fiskal (PRF) memiliki rata-rata 6.80 dengan standar deviasi 34.21, menunjukkan adanya dinamika fiskal antar daerah yang cukup tinggi. Nilai maksimum sebesar 297.37 dan minimum -71.96 memperlihatkan perbedaan signifikan dalam kemampuan daerah meningkatkan penerimaan fiskalnya dari waktu ke waktu.

Terakhir, variabel Pertumbuhan Rasio Belanja (PRB) memiliki rata-rata -0.13 dan standar deviasi 9.67, yang berarti rata-rata belanja daerah relatif stabil namun ada kecenderungan penurunan pada beberapa tahun. Nilai maksimum 25.44 menunjukkan adanya peningkatan belanja di sejumlah daerah, sedangkan nilai minimum -24.42 menandakan penurunan signifikan pada daerah lain.

Secara keseluruhan, hasil analisis deskriptif ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang cukup besar antar kabupaten/kota di Provinsi Aceh dalam hal kinerja fiskal dan pertumbuhan ekonominya. Hal ini mencerminkan adanya variasi kondisi ekonomi daerah, efektivitas pengelolaan keuangan, serta kebijakan fiskal yang diterapkan masing-masing pemerintah daerah selama periode penelitian.

4.2 Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan analisis regresi data panel, tahap penting yang harus dilalui adalah pengujian asumsi klasik. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi syarat-syarat dasar dalam teori ekonometrika, yaitu model yang bersifat Best Linear Unbiased Estimator (BLUE).

Model BLUE berarti bahwa estimasi koefisien regresi yang dihasilkan bersifat tidak bias (unbiased), memiliki varians minimum (efficient), dan linier terhadap parameter (linear). Apabila model regresi memenuhi asumsi-asumsi klasik, maka hasil estimasi dapat diandalkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan maupun penarikan kesimpulan empiris. Dalam penelitian ini yang menerapkan pendekatan regresi data panel, pengujian asumsi klasik memiliki peranan penting karena karakteristik data panel merupakan gabungan antara data lintas wilayah (cross-section) dan data runtut waktu (time series). Kombinasi kedua dimensi tersebut menyebabkan data panel bersifat multidimensional, sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap beberapa asumsi klasik, seperti heteroskedastisitas dan autokorelasi, yang dapat memengaruhi ketepatan hasil estimasi regresi. Oleh sebab itu, pengujian asumsi klasik dilakukan secara komprehensif guna memastikan bahwa model yang digunakan layak untuk dianalisis lebih lanjut. Adapun pengujian asumsi klasik yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi:

1. Uji multikolinearitas, yang bertujuan untuk mengidentifikasi adanya hubungan linear yang kuat antarvariabel independen.
2. Uji heteroskedastisitas, yang digunakan untuk menilai apakah varians residual bersifat konstan atau tidak.
3. Uji autokorelasi, yang dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi residual antarperiode pengamatan.

4.2.1 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menilai ada tidaknya keterkaitan linear yang kuat antarvariabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak mengandung multikolinearitas, karena korelasi yang tinggi

antarvariabel bebas dapat menyebabkan ketidakstabilan koefisien regresi dan menyulitkan proses interpretasi hasil estimasi. Kondisi tersebut berpotensi membuat masing-masing variabel independen tidak mampu menjelaskan variasi variabel dependen secara optimal karena saling tumpang tindih.

Menurut Gujarati (2012), mendefinisikan multikolinearitas sebagai kondisi ketika dua atau lebih variabel independen dalam suatu model regresi memiliki hubungan linear yang tinggi. Dampak yang dapat ditimbulkan antara lain meningkatnya nilai standar error sehingga statistik uji t menjadi tidak signifikan, nilai koefisien determinasi (R^2) yang tinggi namun sebagian besar koefisien regresi tidak signifikan, arah koefisien yang tidak sesuai dengan teori ekonomi, serta sensitivitas model terhadap perubahan kecil pada data. Untuk mengidentifikasi keberadaan multikolinearitas, penelitian ini menggunakan indikator Variance Inflation Factor (VIF). Secara umum, kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- (1) apabila nilai Centered VIF < 10 , maka model dinyatakan bebas dari masalah multikolinearitas;
- (2) apabila nilai Centered VIF ≥ 10 , maka terdapat indikasi multikolinearitas yang serius antarvariabel independen.

Hasil pengujian multikolinearitas menggunakan perangkat lunak EViews 13 disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
PRK	0.004206	14.08497	1.420608
PRE	0.003303	10.47791	1.235220
PRF	0.005690	17.34590	1.707416
PRB	0.004920	8.617912	1.131194
C	0.042606	18.20373	NA

Sumber : Eviews 13, Data Diolah (2025)

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel di atas, diketahui bahwa nilai Centered VIF untuk seluruh variabel independen (PRK sampai PRB) berada di bawah angka 10, yaitu berkisar antara 1.13 hingga 1.70. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan linear yang kuat antar variabel independen dalam

model regresi. Nilai-nilai VIF yang kecil juga menunjukkan bahwa variabel bebas dalam model ini memiliki informasi yang berbeda dan tidak saling memengaruhi secara kuat. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dapat dinyatakan bebas dari masalah multikolinearitas dan layak dilanjutkan ke tahap analisis berikutnya. Hasil ini juga memperkuat bahwa variabel, Pertumbuhan Rasio Kemandirian, Pertumbuhan Rasio Efektivitas, Pertumbuhan Rasio Fiskal, Pertumbuhan Belanja, memiliki hubungan yang relatif independen satu sama lain dalam menjelaskan variasi terhadap variabel dependen yaitu Pertumbuhan Ekonomi Daerah (PE). Dengan kata lain, masing-masing variabel dapat diuji secara statistik tanpa adanya pengaruh multikolinearitas yang signifikan.

4.2.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varians residual antarobservasi. Salah satu asumsi utama dalam model regresi linear klasik adalah bahwa varians residual bersifat konstan (homoskedastis). Apabila asumsi ini tidak terpenuhi dan varians residual berbeda-beda, maka kondisi tersebut disebut heteroskedastisitas. Keberadaan heteroskedastisitas dapat menyebabkan hasil estimasi menjadi tidak efisien, meskipun koefisien regresi tetap bersifat tidak bias. Pada data panel atau data cross-section, heteroskedastisitas relatif sering muncul karena perbedaan karakteristik ekonomi, kapasitas fiskal, dan tingkat pembangunan antarunit observasi, dalam hal ini kabupaten/kota.

Untuk mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini, digunakan uji Breusch–Pagan–Godfrey (BPG) yang tersedia dalam perangkat lunak EViews 13. Pengujian ini bertujuan untuk menilai apakah varians residual antarobservasi bersifat sama (homoskedastik) atau berbeda (heteroskedastik). Hasil pengujian heteroskedastisitas selanjutnya disajikan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Uji Heteroskedastisitas

F-statistic	1.228413	Prob. F(4,110)	0.3030
Obs*R-squared	4.917344	Prob. Chi-Square(4)	0.2959
Scaled explained SS	8.466768	Prob. Chi-Square(4)	0.0759

Sumber : Eviews 13, Data Diolah (2025)

Berdasarkan hasil pengujian yang disajikan pada tabel sebelumnya, diperoleh nilai Prob. F(4,110) sebesar 0,3030, Prob. Chi-Square(4) sebesar 0,2959, serta Prob. Scaled Explained SS sebesar 0,0759. Seluruh nilai probabilitas tersebut berada di atas tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak menunjukkan adanya gejala heteroskedastisitas.

Hasil tersebut mengindikasikan bahwa model regresi data panel dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi homoskedastisitas, yang berarti varians residual bersifat konstan pada seluruh observasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebaran error term pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Aceh selama periode 2020–2024 relatif seragam, sehingga model regresi dapat dinyatakan stabil dan layak digunakan untuk analisis lanjutan. Selain itu, temuan ini juga menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen terhadap pertumbuhan ekonomi daerah tidak dipengaruhi oleh perbedaan tingkat fluktuasi residual antarwilayah. Oleh karena itu, tidak diperlukan transformasi data maupun penyesuaian metode estimasi tambahan, karena model telah memenuhi salah satu asumsi utama dalam regresi linear klasik.

4.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dalam regresi data panel dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara kesalahan pengganggu (residual) pada suatu periode dengan residual pada periode sebelumnya dalam unit observasi yang sama. Dalam konteks data panel, autokorelasi dapat muncul akibat adanya dimensi waktu (time series) pada setiap kabupaten/kota, sehingga error pada satu tahun berpotensi memengaruhi error pada tahun berikutnya. Menurut Gujarati (2012) dan Baltagi (2015), menyatakan bahwa model regresi yang baik seharusnya terbebas dari autokorelasi. Apabila autokorelasi terjadi, maka hasil estimasi menjadi tidak efisien meskipun koefisien regresi tetap bersifat tidak bias. Kondisi tersebut dapat menyebabkan standar error menjadi tidak akurat, sehingga uji signifikansi statistik, baik uji t maupun uji F, berpotensi memberikan kesimpulan yang menyesatkan. Dalam penelitian ini, pengujian autokorelasi dilakukan dengan menggunakan nilai

Durbin–Watson (DW) yang dihasilkan dari estimasi model regresi data panel menggunakan perangkat lunak EViews 13. Hasil pengujian tersebut selanjutnya disajikan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Uji Autokorelasi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PRK	0.044806	0.028389	1.578256	0.1174
PRE	0.047607	0.027409	1.736935	0.0852
PRF	-0.115466	0.045188	-2.555217	0.0120
PRB	0.152680	0.061494	2.482834	0.0145
C	6.337067	0.517326	12.24965	0.0000
R-squared	0.072923	Mean dependent var		6.206401
Adjusted R-squared	0.039211	S.D. dependent var		5.243036
S.E. of regression	5.139215	Akaike info criterion		6.154183
Sum squared resid	2905.269	Schwarz criterion		6.273527
Log likelihood	-348.8655	Hannan-Quinn		6.202624
F-statistic	2.163124	Durbin-Watson stat		1.702661
Prob(F-statistic)	0.077853			

Sumber: Eviews 13, Data Diolah (2025)

Nilai Durbin–Watson (DW) yang diperoleh sebesar 1,70, berada pada rentang 1,5 hingga 2,5. Rentang tersebut menunjukkan bahwa dalam model regresi data panel yang digunakan tidak ditemukan gejala autokorelasi, baik autokorelasi positif maupun negatif. Dengan demikian, model telah memenuhi asumsi klasik terkait independensi residual, yang berarti kesalahan pengganggu pada suatu periode tidak berkorelasi dengan kesalahan pada periode sebelumnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa model regresi data panel yang digunakan memiliki tingkat kestabilan yang memadai dalam menjelaskan hubungan antara variabel-variabel kinerja keuangan daerah meliputi Pertumbuhan Rasio Kemandirian (PRK), Pertumbuhan Rasio Efektivitas (PRE), Pertumbuhan Rasio Fiskal (PRF), dan Pertumbuhan Rasio Belanja (PRB) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (PE) pada 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh selama periode 2020–2024.

4.3 Pemilihan Model Uji

Sebelum menetapkan model regresi data panel yang paling sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini, dilakukan terlebih dahulu serangkaian pengujian pemilihan model. Pengujian tersebut meliputi Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji

Lagrange Multiplier (LM). Ketiga uji ini bertujuan untuk menentukan model estimasi yang paling tepat sesuai dengan karakteristik data panel, apakah Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), atau Random Effect Model (REM). Tahapan pemilihan model menjadi penting karena masing-masing pendekatan memiliki asumsi dan karakteristik yang berbeda, sehingga penerapan model yang tidak sesuai dapat menghasilkan estimasi dan kesimpulan yang kurang akurat.

4.3.1 Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk membandingkan kesesuaian antara Common Effect Model (CEM) dan Fixed Effect Model (FEM). Tujuan utama pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antar unit observasi (cross-section effect) dalam model. Dengan kata lain, uji ini menguji apakah setiap kabupaten/kota di Provinsi Aceh memiliki nilai intersep yang sama atau berbeda. Kriteria pengambilan keputusan dalam Uji Chow adalah sebagai berikut: apabila nilai probabilitas (p-value) lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis nol yang menyatakan tidak adanya perbedaan antarindividu ditolak, sehingga model yang lebih tepat digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM). Sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka hipotesis nol diterima dan Common Effect Model (CEM) dinilai sudah memadai untuk merepresentasikan data.

Tabel 4.5 Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	0.905366	(22,88)	0.5881
Cross-section Chi-square	23.464062	22	0.3759

Sumber: Eviews 13, Data Diolah (2025)

Berdasarkan hasil Uji Chow yang disajikan pada Tabel 4.2.4, diperoleh nilai probabilitas Cross-section F sebesar 0,5881 dan Cross-section Chi-square sebesar 0,3759. Kedua nilai probabilitas tersebut berada di atas tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antar unit observasi (kabupaten/kota) dalam model yang diuji. Dengan demikian, keputusan yang diambil adalah gagal menolak hipotesis nol (H_0), sehingga model

yang paling sesuai pada tahap ini adalah Common Effect Model (CEM). Temuan ini mengindikasikan bahwa seluruh kabupaten/kota dalam penelitian diperlakukan memiliki perilaku yang relatif homogen terhadap variabel-variabel penelitian, tanpa adanya pengaruh tetap (fixed effect) yang bersifat spesifik pada masing-masing daerah. Model Common Effect selanjutnya digunakan sebagai dasar awal untuk melanjutkan ke tahap pengujian berikutnya.

Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan Uji Hausman, yang bertujuan untuk menentukan model estimasi yang paling tepat antara Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM). Uji ini digunakan untuk menilai apakah efek individual dalam data panel berkorelasi dengan variabel independen. Apabila nilai probabilitas Uji Hausman lebih kecil dari 0,05, maka efek individual dianggap berkorelasi dengan variabel independen sehingga model yang tepat adalah Fixed Effect Model. Sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka Random Effect Model dinilai lebih sesuai untuk digunakan.

4.3.2 Uji Hausman

Tahap berikutnya adalah melakukan Uji Hausman, yang digunakan untuk membandingkan antara model Fixed Effect (FEM) dan Random Effect (REM). Uji ini bertujuan untuk menguji apakah efek individu dalam data memiliki korelasi dengan variabel-variabel independen. Jika nilai probabilitas uji Hausman lebih kecil dari 0,05, maka efek individu dianggap berkorelasi dengan variabel independen dan model yang tepat adalah *Fixed Effect*. Sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka efek individu tidak berkorelasi dan model yang paling efisien adalah *Random Effect*. 4.6

Tabel 4.6 Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	8.643132	4	0.0707

Sumber : Eviews 13, Data Diolah (2025)

Berdasarkan hasil Uji Hausman yang disajikan pada Tabel 4.1.2, diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,0707, yang berada di atas tingkat signifikansi 0,05.

Dengan demikian, keputusan yang diambil adalah gagal menolak hipotesis nol (H_0). Hasil ini menunjukkan bahwa Random Effect Model (REM) lebih tepat digunakan dibandingkan dengan Fixed Effect Model (FEM). Temuan tersebut mengindikasikan bahwa perbedaan antara estimator Fixed Effect dan Random Effect tidak signifikan secara statistik, sehingga komponen gangguan (error term) dalam model dapat dianggap tidak berkorelasi dengan variabel independen. Oleh karena itu, estimator Random Effect dinilai lebih efisien dan tetap bersifat tidak bias, sehingga layak digunakan dalam penelitian ini.

4.3.3 Uji Lagrange Multiplier

Setelah pelaksanaan Uji Chow dan Uji Hausman, tahap selanjutnya adalah melakukan Uji Lagrange Multiplier (LM) yang dikembangkan oleh Breusch dan Pagan (1980). Uji ini digunakan untuk menentukan apakah Random Effect Model (REM) lebih sesuai dibandingkan dengan Common Effect Model (CEM) dalam analisis regresi data panel. Secara konseptual, Uji LM bertujuan untuk mengidentifikasi keberadaan efek acak (random effect) dalam struktur data panel. Efek acak mencerminkan adanya variasi yang tidak teramati (*unobserved heterogeneity*), baik antarunit observasi (kabupaten/kota) maupun antarwaktu (periode 2020–2024), yang berpotensi memengaruhi variabel dependen.

Apabila efek acak tersebut terbukti signifikan, maka model Random Effect dianggap lebih representatif karena mampu menangkap variasi tersebut secara statistik. Hipotesis yang digunakan dalam Uji Lagrange Multiplier dirumuskan sebagai berikut. H_0 (Hipotesis nol): Tidak terdapat efek acak dalam model regresi data panel, sehingga Common Effect Model (CEM) lebih tepat digunakan. H_1 (Hipotesis alternatif): Terdapat efek acak yang signifikan dalam model regresi data panel, sehingga Random Effect Model (REM) lebih tepat digunakan. Jika nilai probabilitas (p-value) $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan Random Effect Model (REM) dinyatakan lebih sesuai. Jika nilai probabilitas (p-value) $> 0,05$, maka H_0 gagal ditolak dan Common Effect Model (CEM) dianggap lebih tepat digunakan.

Tabel 4.7 Uji Lagrange Multiplier

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	0.192077	75.58564	75.77771 (0.0000)
	(0.6612)	(0.0000)	

Sumber: Eviews 13, Data Diolah (2025)

Hasil pengujian yang disajikan pada tabel sebelumnya menunjukkan bahwa nilai probabilitas uji Breusch–Pagan (cross-section) sebesar 0,6612 (lebih besar dari 0,05), yang mengindikasikan tidak ditemukannya efek acak yang signifikan antar kabupaten/kota. Namun, pada dimensi time dan both (kombinasi waktu dan individu), diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,0000 (lebih kecil dari 0,05), yang menandakan adanya efek acak yang signifikan secara statistik. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol (H_0) ditolak untuk dimensi waktu dan kombinasi waktu–daerah. Hal ini menunjukkan bahwa data panel yang digunakan dalam penelitian ini mengandung komponen efek acak yang signifikan pada dimensi waktu. Dengan demikian, Random Effect Model (REM) merupakan model estimasi yang paling tepat untuk digunakan dalam analisis regresi data panel pada penelitian ini.

Secara substantif, hasil ini mengindikasikan bahwa variasi pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Aceh lebih banyak dipengaruhi oleh dinamika perubahan dari waktu ke waktu dibandingkan oleh perbedaan karakteristik antar daerah. Kondisi tersebut dapat dipahami mengingat adanya perubahan kebijakan fiskal di tingkat nasional, fluktuasi kondisi ekonomi makro, serta pengaruh faktor eksternal seperti pandemi COVID-19 dan perubahan harga komoditas, yang secara bersama-sama memengaruhi kinerja perekonomian daerah dari tahun ke tahun.

4.4. Hasil Estimasi Model Random Effect (REM)

Berdasarkan rangkaian pengujian pemilihan model yang telah dilakukan sebelumnya, meliputi Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier (LM), dapat disimpulkan bahwa model estimasi yang paling sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini adalah Random Effect Model (REM). Penetapan model tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa variasi antar daerah (cross-section)

maupun variasi antar waktu (time series) bersifat acak dan tidak menunjukkan korelasi yang signifikan dengan variabel-variabel independen.

Dalam kondisi tersebut, estimator yang dihasilkan oleh Random Effect Model dinilai lebih efisien, konsisten, dan tidak bias, sehingga memenuhi kriteria Best Linear Unbiased Estimator (BLUE). Penggunaan REM memungkinkan analisis yang lebih tepat dalam menjelaskan pengaruh faktor-faktor fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dengan tetap mempertimbangkan adanya variasi acak yang bersumber dari karakteristik daerah dan dinamika waktu yang tidak dapat diamati secara langsung. Dengan demikian, Random Effect Model dipandang sebagai pendekatan yang paling sesuai dengan struktur data panel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh selama periode 2020–2024. Hasil estimasi model Random Effect yang diperoleh melalui metode Generalized Least Squares (EGLS) selanjutnya disajikan pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8 Random Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.337067	0.522293	12.13318	0.0000
PRK	0.044806	0.028662	1.563249	0.1209
PRE	0.047607	0.027672	1.720419	0.0882
PRF	-0.115466	0.045622	-2.530920	0.0128
PRB	0.152680	0.062084	2.459226	0.0155

Effects Specification

	S.D.	Rho
Cross-section random	0.000000	0.0000
Idiosyncratic random	5.188551	1.0000

Weighted Statistics

R-squared	0.072923	Mean dependent var	6.206401
Adjusted R-squared	0.039211	S.D. dependent var	5.243036
S.E. of regression	5.139215	Sum squared resid	2905.269
F-statistic	2.163124	Durbin-Watson stat	1.651165
Prob(F-statistic)	0.077853		

Unweighted Statistics

R-squared	0.072923	Mean dependent var	6.206401
Sum squared resid	2905.269	Durbin-Watson stat	1.651165

Sumber: Eviews 13, Data Diolah (2025)

Hasil estimasi menggunakan Random Effect Model (REM) menunjukkan bahwa pertumbuhan rasio kemandirian fiskal memiliki arah koefisien positif, namun tidak signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Aceh selama periode 2020–2024. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan proporsi kemampuan daerah dalam membiayai pengeluarannya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum secara nyata mendorong peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Berdasarkan hasil estimasi menggunakan Random Effect Model (REM), diperoleh temuan bahwa variabel Pertumbuhan Rasio Kemandirian Fiskal (PRK) memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,044806, namun dengan nilai probabilitas 0,1209 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 5 persen. Dengan demikian, secara statistik pertumbuhan rasio kemandirian fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Aceh selama periode 2020–2024, sehingga Hipotesis 1 (H1) ditolak. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat kecenderungan hubungan positif, peningkatan kemandirian fiskal daerah belum cukup kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara nyata.

Selanjutnya, variabel Pertumbuhan Rasio Efektivitas PAD (PRE) juga menunjukkan koefisien regresi positif sebesar 0,047607, namun nilai probabilitasnya sebesar 0,0882, yang masih berada di atas tingkat signifikansi 5 persen. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan PAD belum memberikan pengaruh signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, Hipotesis 2 (H2) ditolak. Kondisi ini mencerminkan bahwa meskipun peningkatan efektivitas PAD berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dampaknya belum cukup kuat untuk memberikan kontribusi yang signifikan selama periode penelitian.

Berbeda dengan dua variabel sebelumnya, Pertumbuhan Rasio Fiskal (PF) menunjukkan koefisien regresi sebesar $-0,115466$ dengan nilai probabilitas 0,0128, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 5 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa pertumbuhan rasio fiskal berpengaruh signifikan secara statistik, namun dengan arah negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, Hipotesis 3 (H3)

ditolak karena arah pengaruh tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan pertumbuhan fiskal di kabupaten/kota Provinsi Aceh lebih banyak bersumber dari dana transfer pemerintah pusat, bukan dari peningkatan PAD yang produktif, sehingga belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara optimal.

Selanjutnya, variabel PRB (Pertumbuhan Rasio Belanja) Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan belanja daerah memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,152680 dengan nilai probabilitas 0,0155, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 5 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, Hipotesis 4 (H4) diterima. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan belanja pemerintah daerah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan aktivitas pembangunan dan efek pengganda terhadap perekonomian daerah.

Secara keseluruhan, hasil estimasi menggunakan model Random Effect menunjukkan bahwa variabel-variabel fiskal yang digunakan dalam penelitian ini memiliki arah dan tingkat pengaruh yang berbeda terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Variabel PRB (Pertumbuhan Rasio Belanja Daerah) terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yang mengindikasikan bahwa peningkatan belanja daerah, khususnya belanja yang bersifat produktif, mampu mendorong aktivitas ekonomi dan menciptakan efek pengganda bagi perekonomian daerah. Sebaliknya, variabel PRF (Pertumbuhan Rasio Fiskal) menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan penerimaan fiskal yang tidak diikuti dengan kualitas alokasi belanja yang produktif justru dapat menimbulkan inefisiensi dan menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.

Sementara itu, variabel PRE (Pertumbuhan Rasio Efektivitas PAD) dan PRK (Pertumbuhan Rasio Kemandirian Fiskal) memiliki arah koefisien positif, namun tidak signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 5 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan efektivitas PAD dan kemandirian fiskal belum mampu memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota

di Provinsi Aceh selama periode penelitian. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat upaya peningkatan kinerja pendapatan daerah, kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah masih relatif terbatas dan belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mendorong kegiatan ekonomi yang produktif.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa kualitas belanja daerah memiliki peranan yang lebih dominan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dibandingkan sekadar peningkatan penerimaan fiskal. Di sisi lain, tingginya ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat serta belum optimalnya pemanfaatan pendapatan daerah menjadi faktor yang menyebabkan peningkatan fiskal dan kemandirian belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan di Provinsi Aceh.

4.5 Pembahasan Hasil Penelitian

Bagian ini membahas secara komprehensif hasil estimasi regresi data panel yang digunakan untuk menilai sejauh mana rasio-rasio kinerja keuangan daerah memengaruhi pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Aceh selama periode 2020–2024. Pendekatan regresi data panel dipilih karena data penelitian memiliki dua dimensi, yaitu dimensi waktu (time series) dan dimensi wilayah (cross-section), sehingga mampu menangkap dinamika perubahan antarperiode sekaligus perbedaan karakteristik fiskal antar daerah

Penggunaan regresi data panel memberikan keunggulan metodologis karena memungkinkan analisis yang lebih akurat dibandingkan regresi linier berganda konvensional. Metode ini dapat mengakomodasi heterogenitas antar kabupaten/kota serta variasi kondisi ekonomi dari waktu ke waktu, sehingga hasil estimasi yang diperoleh lebih mencerminkan kondisi empiris kinerja keuangan daerah di Provinsi Aceh.

4.5.1 Pengaruh Pertumbuhan Rasio Kemandirian Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil estimasi menggunakan model Random Effect Model (REM) menunjukkan bahwa variabel Pertumbuhan Rasio Kemandirian Fiskal memiliki

koefisien regresi bernilai positif, namun tidak signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Aceh selama periode 2020–2024. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kemampuan daerah dalam membiayai pengeluarannya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun arah hubungan antara kemandirian fiskal dan pertumbuhan ekonomi bersifat positif, kapasitas fiskal daerah di Aceh masih relatif terbatas. Sebagian besar pemerintah daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), sehingga peningkatan rasio kemandirian fiskal belum sepenuhnya mencerminkan kemandirian ekonomi yang sesungguhnya.

Ditinjau dari perspektif teori desentralisasi fiskal (Tiebout, 1961; Oates, 1972), temuan ini mengindikasikan bahwa otonomi keuangan daerah di Provinsi Aceh belum berjalan secara optimal dalam mendorong kemandirian ekonomi. Idealnya, peningkatan proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam merancang dan membiayai pembangunan sesuai kebutuhan lokal. Namun, struktur PAD di Aceh yang masih didominasi oleh pajak dan retribusi yang bersifat konsumtif serta rendahnya kontribusi sektor produktif menyebabkan peningkatan rasio kemandirian fiskal belum menghasilkan efek pengganda yang signifikan terhadap aktivitas ekonomi riil.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Sari & Wijaya (2024), Verawaty et al. (2017), Afif & Ciptawaty (2020), Luthvia et al. (2023), Nisak et al. (2024) dan Katit Fransiskus & Pinatik (2016) yang sama-sama menemukan bahwa rasio kemandirian fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Kedua studi tersebut menegaskan bahwa peningkatan PAD yang tidak diiringi dengan pengalokasian belanja publik yang produktif hanya berfungsi untuk menutup belanja rutin, sehingga tidak menimbulkan dampak terhadap perluasan

aktivitas ekonomi. Dengan kata lain, peningkatan kemandirian fiskal yang bersifat administratif tidak identik dengan peningkatan kemandirian ekonomi daerah.

Dalam konteks Provinsi Aceh, tingkat ketergantungan fiskal yang tinggi memperlihatkan bahwa peningkatan rasio kemandirian fiskal masih bersifat simbolik dan belum berdampak substantif terhadap pembangunan ekonomi. Daerah dengan kapasitas PAD lebih tinggi, seperti Banda Aceh dan Lhokseumawe, menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, namun kontribusinya belum cukup besar untuk mengubah pola agregat di tingkat provinsi. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa kemandirian fiskal baru akan memberikan dampak signifikan apabila didukung oleh reformasi belanja yang berpihak pada sektor produktif, peningkatan efisiensi anggaran, serta inovasi kebijakan pendapatan daerah.

Dengan demikian, meskipun arah hubungan kemandirian fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi bersifat positif, pengaruhnya belum signifikan secara statistik. Kondisi ini menegaskan perlunya transformasi pengelolaan PAD agar tidak hanya berfokus pada peningkatan penerimaan, tetapi juga pada kualitas penggunaannya untuk memperluas basis ekonomi daerah dan memperkuat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

4.5.2 Pengaruh Rasio Pertumbuhan Efektivitas PAD terhadap Pertumbuhan Ekonom

Berdasarkan hasil estimasi menggunakan Random Effect Model (REM), variabel Rasio Pertumbuhan Efektivitas PAD (PRE) memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,047607 dengan nilai probabilitas 0,0882. Nilai probabilitas tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 5 persen ($\alpha = 0,05$), namun lebih kecil dari tingkat signifikansi 10 persen ($\alpha = 0,10$). Dengan demikian, secara statistik dapat disimpulkan bahwa Rasio Pertumbuhan Efektivitas PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada tingkat signifikansi 5 persen, tetapi berpengaruh signifikan pada tingkat signifikansi 10 persen.

Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan efektivitas pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) cenderung diikuti oleh

peningkatan pertumbuhan ekonomi, meskipun kekuatan pengaruhnya masih relatif lemah. Secara ekonomis, efektivitas PAD mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan melalui perencanaan yang realistis, sistem pemungutan yang efisien, serta pengelolaan administrasi pendapatan yang lebih baik. Ketika realisasi PAD meningkat seiring dengan target yang direncanakan, pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk membiayai kegiatan pembangunan dan mendorong aktivitas ekonomi lokal.

Namun demikian, tidak signifikannya pengaruh pada tingkat kepercayaan 5 persen mengindikasikan bahwa kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah di Provinsi Aceh masih relatif terbatas. Kondisi ini menyebabkan peningkatan efektivitas PAD belum sepenuhnya mampu memberikan dampak yang kuat dan konsisten terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Sebagian besar pemerintah kabupaten/kota di Aceh masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), sehingga peran PAD sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan belum optimal.

Selain itu, peningkatan efektivitas PAD tidak selalu diikuti oleh alokasi belanja yang produktif. Apabila tambahan penerimaan daerah lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja rutin dibandingkan belanja pembangunan, maka dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi terbatas. Oleh karena itu, efektivitas PAD perlu diimbangi dengan kualitas perencanaan dan pengalokasian belanja daerah yang berorientasi pada sektor-sektor produktif agar mampu memberikan efek pengganda yang lebih besar terhadap perekonomian daerah.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa Rasio Pertumbuhan Efektivitas PAD memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun belum cukup kuat secara statistik pada tingkat signifikansi yang lebih ketat. Temuan ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan efektivitas PAD perlu disertai dengan penguatan struktur ekonomi daerah serta optimalisasi penggunaan anggaran pembangunan agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi

kabupaten/kota di Provinsi Aceh secara lebih berkelanjutan. Dari perspektif teori desentralisasi fiskal, temuan ini sejalan dengan pandangan Oates (1972) yang menyatakan bahwa keberhasilan desentralisasi fiskal sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam mengelola penerimaan secara efektif. Akan tetapi, efektivitas penerimaan tersebut perlu diiringi dengan peningkatan kapasitas fiskal dan kualitas belanja daerah agar dapat memberikan dampak yang lebih kuat dan berkelanjutan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Hutasuhut et al. (2025) yang menunjukkan bahwa *local own-source revenue* (pendapatan asli daerah) berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Pulau Sumatra. Penelitian tersebut menegaskan bahwa pendapatan daerah baru memberikan dampak yang berarti terhadap pertumbuhan ekonomi apabila dialokasikan secara efektif ke dalam belanja modal yang produktif. Tanpa dukungan kualitas belanja yang memadai, peningkatan pendapatan daerah cenderung belum mampu menciptakan efek pengganda yang kuat terhadap perekonomian regional.

Hasil yang sama juga ditemukan oleh Malau et al. (2025) dalam penelitiannya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang menyimpulkan bahwa rasio efektivitas PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa rendahnya diversifikasi sumber PAD serta ketergantungan pada sektor pajak tertentu menyebabkan efektivitas PAD belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas PAD perlu didukung oleh struktur ekonomi daerah yang kuat dan beragam agar dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dalam konteks Provinsi Aceh, hasil ini juga diperkuat oleh penelitian Nisak et al. (2024) yang menemukan bahwa rasio efektivitas PAD tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian tersebut menekankan bahwa keterbatasan diversifikasi sumber pendapatan daerah serta dominasi sektor tertentu dalam PAD menyebabkan peningkatan efektivitas PAD belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Dengan demikian, efektivitas PAD yang

tinggi secara administratif belum tentu mencerminkan peningkatan kapasitas ekonomi daerah secara riil.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa meskipun Rasio Efektivitas PAD memiliki arah pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, pengaruh tersebut masih bersifat terbatas dan sangat bergantung pada kualitas struktur pendapatan serta arah alokasi belanja pemerintah daerah. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas PAD di Provinsi Aceh perlu diiringi dengan perbaikan kualitas belanja, khususnya belanja modal dan belanja produktif yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, agar kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih signifikan dan berkelanjutan.

4.5.3 Pengaruh Pertumbuhan Rasio PAD/Fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi

Berdasarkan hasil estimasi menggunakan Random Effect Model (REM), variabel Pertumbuhan Rasio Fiskal (PRF) memiliki koefisien regresi bernilai negatif sebesar $-0,115466$ dengan tingkat signifikansi $0,0128$, yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Temuan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan rasio fiskal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Aceh selama periode 2020–2024. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan adanya pengaruh positif pertumbuhan rasio fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dinyatakan tidak terbukti. Secara ekonometrik, hasil tersebut mengindikasikan bahwa setiap kenaikan pertumbuhan rasio fiskal sebesar 1 persen justru diikuti oleh penurunan laju pertumbuhan ekonomi daerah sekitar $0,115$ persen, dengan asumsi variabel lain dalam model tetap konstan.

Secara empiris, temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan fiskal yang terjadi di sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Aceh belum mencerminkan pertumbuhan penerimaan yang bersumber dari aktivitas ekonomi produktif. Pertumbuhan fiskal yang tercatat lebih banyak dipengaruhi oleh peningkatan penerimaan yang bersifat administratif maupun transfer, serta intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, bukan karena perluasan basis ekonomi riil atau peningkatan kapasitas produksi daerah. Kondisi tersebut menyebabkan

kenaikan fiskal tidak diikuti oleh peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat secara nyata.

Selain itu, peningkatan penerimaan fiskal yang tidak disertai dengan kualitas alokasi belanja yang produktif berpotensi menimbulkan dampak kontraproduktif terhadap pertumbuhan ekonomi. Apabila tambahan penerimaan daerah lebih banyak dialokasikan untuk belanja rutin, belanja operasional, atau belanja administrasi pemerintahan, maka efek pengganda (*multiplier effect*) terhadap perekonomian daerah menjadi terbatas. Dalam jangka pendek, intensifikasi pajak dan retribusi bahkan dapat menekan daya beli masyarakat serta mengurangi ruang aktivitas ekonomi sektor riil, sehingga berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan fiskal yang tinggi tidak selalu menjadi indikator keberhasilan pembangunan ekonomi daerah. Temuan negatif pada variabel PRF menegaskan bahwa kualitas sumber penerimaan dan arah penggunaan anggaran jauh lebih penting dibandingkan sekadar besarnya pertumbuhan fiskal. Oleh karena itu, pertumbuhan fiskal di Provinsi Aceh perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan penerimaan, tetapi juga pada penguatan basis ekonomi lokal serta peningkatan alokasi belanja yang bersifat produktif agar mampu memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di masa mendatang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Katrina Mamuka et al. (2019) yang juga menemukan bahwa PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara. Mamuka (2019) menjelaskan bahwa peningkatan PAD yang tidak disertai dengan optimalisasi belanja produktif hanya meningkatkan beban fiskal tanpa memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian, fenomena negatif yang ditemukan dalam penelitian ini memperkuat temuan bahwa PAD yang bersumber dari kenaikan pajak dan retribusi administrasi berpotensi menekan kinerja ekonomi daerah.

Sementara itu, hasil ini berbeda dengan temuan Andiani et al. (2022) dalam *Measurement Jurnal Akuntansi* Vol. 16 No. 2, yang menunjukkan bahwa PAD

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah. Perbedaan arah pengaruh ini dapat dijelaskan oleh variasi struktur ekonomi dan kemampuan fiskal daerah. Di Aceh, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih relatif kecil dan belum digunakan secara optimal untuk belanja modal yang produktif. Akibatnya, pertumbuhan PAD tidak memberikan dampak langsung terhadap peningkatan output ekonomi daerah. Secara keseluruhan, temuan ini memperlihatkan bahwa peningkatan PAD perlu diikuti dengan perbaikan kualitas belanja pemerintah daerah, khususnya yang berorientasi pada investasi produktif dan pemberdayaan sektor riil, agar efek pertumbuhan fiskal terhadap perekonomian daerah menjadi positif di masa mendatang.

4.5.4 Pengaruh Pertumbuhan Belanja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel dengan model Random Effect (REM), variabel pertumbuhan belanja daerah (PB) menunjukkan koefisien regresi positif dan nilai probabilitas yang signifikan pada tingkat kepercayaan 5 persen. Hasil ini mengindikasikan bahwa peningkatan pertumbuhan belanja pemerintah daerah memiliki kontribusi nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Secara empiris, hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat pertumbuhan belanja daerah—khususnya pada pos-pos belanja produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan—maka semakin besar pula dampaknya terhadap peningkatan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Temuan ini sejalan dengan pandangan Keynesian Fiscal Theory, yang menegaskan bahwa belanja pemerintah merupakan instrumen penting dalam memperkuat permintaan agregat (*aggregate demand*) dan menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) terhadap aktivitas ekonomi. Dalam konteks daerah, peningkatan realisasi belanja publik mampu menstimulasi kegiatan ekonomi melalui pembukaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta peningkatan konsumsi dan investasi lokal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Bisai et al. (2021) dalam *Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan*, yang berjudul *Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Adat Mamta*. Penelitian tersebut menggunakan metode regresi data panel pada lima kabupaten/kota di Provinsi Papua periode 2013–2016 dan menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, baik secara simultan maupun parsial. Nilai probabilitas F-statistic sebesar 0.000000 dan uji-t sebesar 0.0000 menegaskan bahwa setiap peningkatan belanja modal daerah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan PDRB di wilayah penelitian. Peneliti juga mencatat bahwa daerah dengan realisasi belanja modal tertinggi seperti Kota Jayapura memiliki dampak ekonomi yang paling besar dibandingkan wilayah lainnya. Hasil penelitian Bisai et al. (2021) tersebut memperkuat temuan dalam penelitian ini, bahwa belanja daerah yang meningkat secara signifikan akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan kapasitas produksi daerah dan peningkatan kualitas infrastruktur publik. Peningkatan belanja pemerintah daerah, terutama yang bersifat produktif dan berjangka panjang, tidak hanya meningkatkan output ekonomi saat ini tetapi juga memperluas potensi ekonomi daerah di masa mendatang.

Lebih lanjut, temuan ini juga konsisten dengan penelitian Fitri & Putri (2019) yang menemukan bahwa belanja modal dan belanja pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan barat Indonesia. Demikian pula, Widiastuti & Sutrischastini (2022) menyatakan bahwa belanja pemerintah daerah secara agregat memiliki hubungan positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi. Dengan demikian, secara empiris, berbagai hasil penelitian menunjukkan kesamaan arah bahwa peningkatan belanja publik berperan penting dalam mempercepat laju pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia.

Selanjutnya, bukti empiris dari beberapa jurnal yang kamu unggah juga memperkuat kesimpulan penelitian ini. Haryati et al. (2025) menemukan bahwa belanja modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia, khususnya melalui peningkatan kapasitas produksi

dan fungsi strategis infrastruktur dalam mendukung kegiatan ekonomi lokal. Penelitian tersebut menegaskan bahwa investasi pemerintah melalui belanja modal merupakan instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional

Penelitian Kirana & Susilo (2024) juga menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten, DI Yogyakarta, dan Jawa Tengah selama periode 2012–2021. Temuan ini konsisten dengan pandangan Keynesian yang menegaskan bahwa peningkatan belanja pemerintah dapat mendorong kenaikan permintaan agregat serta output perekonomian. Oleh karena itu, pengalokasian belanja modal yang dilakukan secara optimal berpotensi memberikan kontribusi yang berarti terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Fifiyanti et al. (2025) di Provinsi Sumatera Barat juga menunjukkan bahwa belanja modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, bersamaan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Temuan tersebut mengindikasikan bahwa belanja modal tidak hanya berperan dalam pengembangan infrastruktur fisik, tetapi juga berfungsi sebagai pendorong peningkatan kualitas pembangunan secara menyeluruh. Hasil serupa ditunjukkan oleh Rahayu et al. (2025) yang menemukan bahwa belanja modal memiliki pengaruh positif signifikan terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara. Belanja modal dalam penelitian tersebut berperan langsung dalam meningkatkan produktivitas wilayah melalui pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik yang mendukung aktivitas ekonomi, sekaligus memperkuat daya saing regional

Dengan merujuk pada bukti empiris tersebut, dapat ditegaskan bahwa hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Bisai et al. (2021), Fitri & Putri (2019), Widiastuti & Sutrischastini (2022), Haryati et al. (2025), Kirana & Susilo (2024), Fifiyanti et al. (2025), dan Rahayu et al. (2025) serta didukung oleh literatur empiris lainnya yang menekankan pentingnya peranan belanja daerah, khususnya belanja modal, sebagai instrumen fiskal utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh rasio kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Aceh selama periode 2020–2024, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Rasio Pertumbuhan Kemandirian Fiskal menunjukkan pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kemandirian fiskal daerah, yang tercermin dari pertumbuhan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan, belum mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa meskipun terjadi perbaikan kemandirian fiskal, sebagian besar daerah di Aceh masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, sehingga ruang fiskal daerah untuk mendorong aktivitas ekonomi secara mandiri masih relatif terbatas.
2. Rasio Pertumbuhan Efektivitas PAD memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target PAD belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kualitas dan produktivitas belanja yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, efektivitas pencapaian target pendapatan daerah belum secara optimal diterjemahkan menjadi stimulus ekonomi yang mampu mendorong peningkatan output daerah.
3. Rasio Pertumbuhan Fiskal terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan pertumbuhan fiskal, khususnya yang bersumber dari PAD dan penerimaan daerah lainnya, belum dikelola

secara efisien dan produktif dalam mendukung aktivitas ekonomi. Pertumbuhan fiskal yang tidak diiringi dengan kualitas perencanaan dan alokasi belanja yang tepat sasaran berpotensi menimbulkan inefisiensi, sehingga justru menekan laju pertumbuhan ekonomi daerah.

4. Rasio Pertumbuhan Belanja Daerah menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Hasil ini menegaskan bahwa peningkatan belanja daerah, khususnya belanja yang bersifat produktif, memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan aktivitas pembangunan, penyediaan infrastruktur, serta perluasan pelayanan publik. Temuan ini mengonfirmasi bahwa kebijakan ekspansi belanja pemerintah daerah masih menjadi instrumen fiskal yang efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak seluruh rasio kinerja keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, namun pertumbuhan belanja daerah merupakan faktor yang paling konsisten dan dominan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Aceh selama periode penelitian. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya ditentukan oleh peningkatan pendapatan, tetapi lebih ditentukan oleh bagaimana belanja daerah dialokasikan dan dimanfaatkan secara produktif untuk mendukung pembangunan ekonomi.

5.2 Saran

1. Saran Kebijakan bagi Pemerintah Daerah

1. Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh disarankan untuk meningkatkan kualitas belanja daerah, khususnya belanja yang bersifat produktif seperti belanja modal, infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor yang memiliki efek pengganda (multiplier effect) terhadap perekonomian. Mengingat hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi, maka kebijakan fiskal perlu lebih difokuskan pada belanja yang mampu mendorong aktivitas ekonomi riil dan penciptaan nilai tambah.

2. Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting) agar peningkatan belanja daerah tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga menghasilkan output dan outcome pembangunan yang terukur. Dengan perencanaan yang lebih terarah, belanja daerah diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih efektif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi.
3. Meskipun rasio pertumbuhan kemandirian fiskal dan efektivitas PAD belum menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah tetap perlu memperkuat upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Upaya ini dapat dilakukan dengan memperbaiki sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah, memperluas basis pajak, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
4. Pemerintah daerah di Provinsi Aceh disarankan untuk mengelola pertumbuhan fiskal secara lebih hati-hati dan efisien, mengingat hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan fiskal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, peningkatan penerimaan daerah harus diiringi dengan pengelolaan belanja yang efisien, transparan, dan tepat sasaran agar tidak menimbulkan inefisiensi fiskal yang justru menghambat pertumbuhan ekonomi.
5. Dalam konteks kekhususan Aceh yang menerima Dana Otonomi Khusus, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa alokasi Dana Otonomi Khusus benar-benar diarahkan pada program-program pembangunan yang produktif, berkelanjutan, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga dana tersebut tidak hanya meningkatkan kapasitas fiskal secara nominal, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara nyata.

2. Saran bagi Peneliti Selanjutnya

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain di luar rasio kinerja keuangan daerah, seperti tingkat investasi daerah, kualitas sumber daya manusia, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, atau indeks pembangunan manusia (IPM), agar model analisis mampu menjelaskan pertumbuhan ekonomi secara lebih komprehensif.
2. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan periode penelitian yang lebih panjang atau membandingkan beberapa provinsi, sehingga dapat menangkap dinamika jangka panjang serta perbedaan karakteristik fiskal antar daerah.
3. Penelitian berikutnya juga disarankan untuk memisahkan jenis belanja daerah, seperti belanja modal dan belanja operasional, sehingga dapat diketahui secara lebih spesifik jenis belanja mana yang paling efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
4. Selain menggunakan pendekatan regresi data panel konvensional, penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan penggunaan metode estimasi alternatif, seperti dynamic panel model (GMM), untuk menangkap efek keterlambatan (lag effect) kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhiantoko, H. (2013). Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten Blora (Studi kasus pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2007-2011). *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Afif, F. Y., & Ciptawaty, U. (2020). Kemandirian Keuangan Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Lampung Tahun Anggaran 2014-2018. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 7, 609. <https://doi.org/10.24843/eeb.2020.v09.i07.p02>
- Akhmad. (2015). *Metodologi Penelitian*. Rajawali Pers.
- Andi, A. (2019). Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangkep. *Meraja Journal*, 2(2), 67–76. https://scholar.google.co.id/scholar?cluster=8619575312878727958&hl=id&as_sdt=2007
- Andiani, L., Sudiarto, E., Lusiana, & Salesti, J. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi sebelum dan saat terjadi Pandemi (pada Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2018 - 2021). *Measurement: Jurnal Akuntansi*, 16(2), 215–220. <https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/measurement/article/view/4624>
- Anisatul, L., PA, D. S., & Harimurti, F. (2016). Pengaruh Pengawasan Internal, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar (Survey pada DPPKAD Kabupaten Karanganyar). *Eksplorasi*, XXIX(2), 283–294. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/9245/4>
- Armaja, A., Ibrahim, R., & Aliamin, A. (2017). Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Kabupaten/Kota di Aceh). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(2), 168–181. <https://doi.org/10.24815/jped.v3i2.8229>

- Aziz, A. (2016). PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH terhadap KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Di Jawa Timur). *Eksis: Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 86–101. <https://doi.org/10.26533/eksis.v11i1.34>
- Bahl, R. W., & Linn, J. F. (1992). *Urban Public Finance in Developing Countries*. Oxford University Press.
- Barro, R. J. (1991). Economic growth in a cross section of countries. *Quarterly Journal of Economics*, 106(2), 407–443. <https://doi.org/10.2307/2937943>
- Bisai, C. M., Romadhan, R., & Hafizrianda, Y. (2021). Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Adat Mamta. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 8(1), 1–13. <https://doi.org/10.56076/jkesp.v8i1.2101>
- Budiman, A. (2018). *Journal of Public Administration Studies Employee Transfer : a Review of Recent Literature*. 3(1), 33–36.
- Ferdiansyah, I., Deviyanti, D. R., & Pattisahusiwa, S. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah. *Inovasi*, 14(1), 44. <https://doi.org/10.29264/jinv.v14i1.3546>
- Fernanda, M. A., Anwar, S., & Sunani, A. (2023). Pengaruh Rasio Efektivitas, Efisiensi, dan Kemandirian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening Di Provinsi Jawa Timur. *Mufakat : Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(3), 1–15.
- Fifiyanti, Y., Maryati, S., Teknologi, I., Agus, H., Manajemen, M., Teknologi, I., & Agus, H. (2025). *Jurnal Penelitian Nusantara Pengaruh PAD , Belanja Modal dan IPM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten / Kota Di Sumatera Barat Menulis : Jurnal Penelitian Nusantara*. 1, 53–60.
- Fitri, N., & Putri, S. (2019). Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Kawasan Barat Indonesia. *Jurnal EMT KITA*, 3(1), 34.
- Hanif, M. I. (2018). EFEKTIVITAS TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI

- VARIABEL INTERVENING (Studi Pada Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2013-2017). *Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia*.
- Harahap, H. F. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 34. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.87>
- Haryati, D. C., Nurpiji, N., Masitoh, G., Saputra, W., & Subarkah, T. (2025). Analisis Efisiensi Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia: Pendekatan Data Panel. *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 5(3), 139–153.
- Hehanussa, S. J. (2015). *PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH dan AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH terhadap TRANSPARANSI dan AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA AMBON* Salomi. 2, 82–90.
- Hutasuhut, N., Yahya, I., & Erwin, K. (2025). Analysis of the Effect of Local Own-Source Revenue, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, And Village Funds on Economic Growth with Capital Expenditure as a Moderating Variable in Regency/City of Sumatera. *International Journal of Research and Review*, 12(9), 621–637. <https://doi.org/10.52403/ijrr.20250959>
- Ihwardi, L. R., & Khoirunurrofik. (2023). Regional Financial Performance and Inclusive Economic Development. *Jurnal Bina Praja*, 15(2), 417–429. <https://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jbp/article/view/1806>
- Karlina, A., & Nur Hamdayani. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan APBD Kota Surabaya Tahun 2012-2015. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(3), 911–924.
- Katit Fransiskus, & Pinatik, S. (2016). Sujarweni (2015 : 1) mendefinisikan akuntansi sebagai suatu aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat , mengklasifikasikan , dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan ole. *Jurnal EMBA*, 4(3), 572–582.
- Katrina Mamuka, K., Pingkan F. Rorong, I., & I. Sumua, J. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Terhadap

- Pertumbuhan Ekonomi kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(03), 118–128.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 (1996).
<https://www.kemendagri.go.id/>
- Kirana Galuh, & Susilo. (2024). ANALISIS PENGARUH BELANJA MODAL, PENYERTAAN MODAL, DAN PERTUMBUHAN PENDUDUK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI. *JOURNAL OF DEVELOPMENT ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES*, 3(4), 1115–1125.
- Lasupu, E., Kalangi, L., & Mawikere, L. M. (2021). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tojo Una-Una. *Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tojo Una-Una*, 9(69), 1433–1441.
- Lucas, R. E. (1988). On the Mechanics of Economic Development. *Journal of Monetary Economics*, 22(1), 3–42. [https://doi.org/10.1016/0304-3932\(88\)90168-7](https://doi.org/10.1016/0304-3932(88)90168-7)
- Luthvia, Triyono, & Noer. (2023). *Kata Kunci: Kinerja Keuangan Daerah, Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Variabel Intervening*. 12(3), 1861–1880.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN. <https://doi.org/978-979-3541-83-5>
- Malau, E. I., Mutiara, I., Astuti, N. D., & Waruwu, H. A. (2025). Pertumbuhan Ekonomi : Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 20(2), 55–61. <http://www.djpk.depkeu.go.id>
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah* (10th ed.). Andi.
- Mataris, H., & Digidowiseiso, K. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017-2019. In *Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora* (Vol. 7, Issue 1). <https://doi.org/10.47313/pjsh.v7i1.1049>
- Michael P. Todaro, S. C. S. (2015). *Economic Development* (12th Editi). Pearson Education Limited.
- Musgrave, R. A. (1959). *The Theory of Public Finance: A Study in Public Economy*. McGraw-Hill.

- Nadia Febrianty, & Gerry Hamdani Putra. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Pada 19 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2021. *Jurnal Kendali Akuntansi*, 1(2), 30–46. <https://doi.org/10.59581/jka-widyakarya.v1i2.154>
- Nisak, Z., Rasyidin, M., Rizkina, A., & Rizal, M. (2024). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi TIN: Terapan Informatika Nusantara. 5(5), 312–320. <https://doi.org/10.47065/tin.v5i5.6100>
- Oates, W. E. (1972). *Fiscal Federalism*. Harcourt Brace Jovanovich.
- Oktrivina, A., Siregar, D., & Mariana, I. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan (Studi Kasus: Pemerintahan Kota Depok-Jawa Barat). *Journal IMAGE |*, 9(1), 1–19.
- Pandjaitan, M. F., Tommy, P., & Untu, V. N. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Manado Tahun 2011-2016. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 6(3), 1398–1408.
- Panggabea, & siregar. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Berbasis Rasio Dan Pertumbuhan Ekonomi Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Sumatera Utara (Studi Kasus Mebidangrokat). *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 11(2), 27–37.
- Poyoh, C. M., Murni, S., & Tulung, J. E. (2017). Analisis Kinerja Pendapatan dan Belanja Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA*, 5(2), 745–752.
- Priyati, R. Y., Ayuni, D., Mulyana, A., Hadziq, M. F., Kurniawan, R., & Mardoni, Y. (2017). Entrepreneurship at Global Crossroad: Challenges and Solutions. In *Seminar Nasional IX Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka Ikatan Alumni – Ut (Ika-Ut)*. http://digilib.stimaimmi.ac.id/document/e_prosiding/bukuproceeding2107-1.pdf#page=140
- Purwanti, E., & Noviyanti, E. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2014-2018. *Among Makarti*, 14(2), 1–12. <https://doi.org/10.52353/ama.v14i2.213>

- Putra Agniveda, I. G. N. A., & Supadmi, N. L. (2019). Pengaruh Penerapan E-Filling Pada Kepatuhan WPOP Pegawai Negeri Sipil Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 28, 242. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p10>
- Rahayu, T., Tobing, R. D., Sinaga, O. S., & Suharianto, J. (2025). Analisis Mediasi Pengaruh Belanja Daerah dalam Pengaruh Belanja Modal dan Investasi PMDN Terhadap PDRB Sumatera Utara 2011-2024. *Jurnal IKRAITH-EKONOMIKA*, 8(3), 632–643. <https://doi.org/10.37817/ikraith-ekonomika.v8i3>
- Ratnawati, R., & Sari, R. P. (2023). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Pada Provinsi Di Pulau Kalimantan Dan Sumatera Periode 2020-2022). *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 12(2), 125. <https://doi.org/10.35906/equili.v12i2.1515>
- Rodríguez-Pose, A., & Ezcurra, R. (2011). Is fiscal decentralization harmful for economic growth? Evidence from the OECD countries. *Journal of Economic Geography*, 11(4), 619–643. <https://doi.org/10.1093/jeg/lbq025>
- Romer, P. M. (1986). Increasing Returns and Long-Run Growth. *Journal of Political Economy*, 94(5), 1002–1037. <https://doi.org/10.1086/261420>
- Sabriani, A. A., & Rahayu, S. (2020). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada SKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2019). *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI Kediri*, 5(2), 14–23. <https://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/14161>
- Saraswati, K. S., & Dharmadiaksa, I. B. (2019). Pengaruh Budaya Organisasi, Kedisiplinan, dan Kompetensi Terhadap Kinerja Pengawasan. *E-Jurnal Akuntansi*, 27, 899. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i02.p03>
- Sari, N. T., & Wijaya, R. S. (2024). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Kemiskinan Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(6), 9489–9505.

- <https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/COSTING/article/view/11198>
- Shafwah, R., Masradin, M., & Mukhtar, A. (2024). Pendapatan Asli Daerah (PAD) : Kunci Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan. *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 7(1), 282–289. <https://doi.org/10.46576/bn.v7i1.4503>
- Simanjuntak, A., & Ginting, C. (2019). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Manajemen*, 5(2), 183–194. <http://ejournal.lmiimedan.net>
- Smith, A. (1776). *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (First edit). W. Strahan and T. Cadell. <https://www.gutenberg.org/ebooks/3300>
- Sodikin, H. Z., & Nopiana, M. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Aceh. *YUME: Journal of Management*, 4(3), 421–433. <https://doi.org/10.37531/yume.vxix.4343>
- Solow, R. M. (1956). A Contribution to the Theory of Economic Growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 70(1), 65–94. <https://doi.org/10.2307/1884513>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sumarjo, H. (2010). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Skripsi Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Sebelas Maret. Surakarta*, 1–76.
- Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Distribusi - Journal of Management and Business*, 7(1), 81–92. <https://doi.org/10.29303/distribusi.v7i1.67>
- Susilowati, D., April Dayanti Sitingjak, C., & Juwari, J. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Belanja Daerah Kota Balikpapan. *Jurnal GeoEkonomi*, 12(1), 115–126. <https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v12i1.149>
- Syamsuddin, I., Muhammad, P. N., & Karim, A. (2022). Journal of Management Analisis Kinerja Anggaran Belanja pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018-2020. *YUME: Journal of Management*, 5(2),

170–177. <https://doi.org/10.2568/yum.v5i2.1557>

- Tolosang, K. D., Pembangunan, J. E., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tomohon. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(03), 79–92.
- Verawaty, Fransisca, S., & Rahmawati, R. (2017). Determinan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Mbia*, 16(1), 1–10.
- Wahyuddin, W., & Sugianal, N. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 51. <https://doi.org/10.29103/jak.v5i1.1813>
- Widiastuti, N., & Sutrischastini, A. (2022). Dampak Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah: Studi Kasus Data Panel Provinsi Di Indonesia. *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, 30(2), 1–16. <https://doi.org/10.32477/jkb.v30i2.394>
- Yuliastati K. (2016). Urgensi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah. *Katalogis*, 4(12), 197–208.
- Yunus, M., Prabowo, H., & Nuryanto, N. (2022). Implementasi Kebijakan Pemerintahan Provinsi Dki Jakarta Sebagai Ibukota Negara Indonesia. *Medium*, 10(1), 323–337. [https://doi.org/10.25299/medium.2022.vol10\(1\).10074](https://doi.org/10.25299/medium.2022.vol10(1).10074)